

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERBANDINGAN PEMBAGIAN
HARTA WARISAN ANTARA FIKIH MAWARIS DENGAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KABUPATEN WAJO
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ANDI WAHYUDI

NIM: 10100113072

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANDI WAHYUDI

Nim : 10100113072

Tempat /Tgl. Lahir : Uraiyang, 11 Desember 1995

Jurusan : Peradilan


Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul : Pandangan Hakim Terhadap Perbandingan Pembagian Harta Warisan Antara Fikih Mawaris Dengan Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Wajo (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Pandangan Hakim Terhadap Perbandingan Pembagian Harta Warisan Antara Fikih Mawaris Dengan Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Wajo (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B)" adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan (tanpa campur tangan penyusun), maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, 20 Juli 2017

Penyusun


ANDI WAHYUDI
Nim: 10100113072

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERBANDINGAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANTARA FIKIH MAWARIS DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KABUPATEN WAJO (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B)" yang disusun oleh Andi Wahyudi, NIM: 10100113072, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 M, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Agustus 2017 M
25 Zulkaidah 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam S., M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hamsir, M.Hum.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Abdillah Mustari, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Supardin, M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Drs. H. Syamsuddin R., M.H.I.	(.....)

Disahkan oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 196210161990031003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sebagaimana mestinya.

Kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tak bertepi, doa yang tiada terputus dari kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahanda H. Andi Rizal dan Ibunda Hj. Besse Tenri Jaja S.Pd.I, yang senantiasa memberikan penulis curahan kasih sayang, nasihat, perhatian, bimbingan serta doa restu yang selalu diberikan sampai saat ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudariku Andi Yuslindah beserta keluarga besar penulis, terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya selama ini dan serta berbagai pihak yang tulus dan ikhlas memberikan andil sejak awal hingga usainya penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam menyusun skripsi ini tidak sedikit kekurangan dan kesulitan yang dialami oleh penulis, baik dalam kepustakaan, penelitian lapangan, maupun hal-hal lainnya. Tetapi berkat ketekunan, bimbingan, petunjuk serta bantuan dari pihak lain akhirnya dapatlah disusun dan diselesaikan skripsi ini menurut kemampuan penulis. Kendatipun isinya mungkin terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, baik mengenai materinya, bahasanya serta sistematikanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun dan diselesaikan berkat petunjuk, bimbingan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, sudah pada tempatnyalah penulis menghanturkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah rela memberikan, baik berupa moril maupun berupa materil dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang terdalam dan tak terhingga terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M.Si.** selaku Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Bapak **Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya;
3. Bapak **Dr. H. Supardin M.H.I.** selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama UIN Alauddin Makassar beserta ibu **Dr. Hj. Patimah, M.Ag.** selaku Sekertaris Jurusan Peradilan Agama;
4. Bapak **Dr. H. Supardin M.H.I.** selaku pembimbing I dan Bapak **Drs. H. Syamsuddin Ranja, M.H.I.** selaku pembimbing II. Kedua beliau, di tengah kesibukan dan aktifitasnya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar;
6. Semua instansi terkait dan responden yang telah bersedia membantu dan memberikan data kepada penulis yakni dari pihak Pengadilan Agama Sengkang yang telah memberikan masukan dan saran selama penyusunan skripsi ini;
7. Seluruh teman kuliah Jurusan Peradilan Agama Angkatan 2013 Khususnya **Andi Musfira Asnur, Mutmainnah, Bukhari, Budiman, Ilham, Munawir, Munandar, Jumardin dan Jumardi** terima kasih atas kesetiakawanan, dukungan dan motivasinya selama ini;
8. Terkhusus kepada **Andi Musfira Asnur** atas waktu dan kesempatan yang selama ini telah membantu dan memberi support untuk

menyelesaikan skripsi ini, serta telah menemani mulai dari nol sampai selesainya skripsi ini;

9. Seluruh teman KKN UIN Alauddin Makassar Angkatan 53 khususnya posko desa Tassese **Jumardi, Jumardin, Baso Arwan, Andi Nur Ana Qurnia, Masyhidayu, Siti Latifa Wulandari, St. Umra Syarif, Laila Humaidah, Nurul Mu'minaati**, dan special untuk bapak posko **S. Krg. Tutu** dan ibu **Dg. Ti'no**. Terima Kasih atas doa, dukungan dan motivasinya selama ini;
10. Kepada Teman-Teman Seperjuangan Madrasah Aliyah Nurul As'adiyah Callaccu Sengkang Angkatan 2013 yang selalu memberi semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;
11. Kepada seluruh keluarga besarku yang tidak bosan memberikan bantuan, semangat kepada penulis sehingga dapat terselasaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan, kerjasama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi penulis, namun melalui doa dan harapan penulis, Semoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dengannya dari Allah swt.

Akhirnya dengan penuh rendah hati penulis mengharap tegur sapa manakala terdapat kekeliruan menuju kebenaran dengan mendahulukan ucapan terima kasih yang tak terhingga.

Makassar, 18 Juli 2017
Penulis

ANDI WAHYUDI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	4
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Tinjauan Umum Tentang Kewarisan Islam	11
1. Pengertian Waris	11
2. Hukum Mempelajari, Mengajarkan, dan Membagikan Harta Warisan.....	12
3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam	15
4. Klasifikasi Ahli Waris	22
5. Rukun dan Syarat Kewarisan	25
6. Sebab-Sebab Terjadinya Hubungan Kewarisan dan Penghalangnya	27
B. Tinjauan Umum Tentang Pembagian Harta Warisan.....	35
1. Pengertian Harta Warisan.....	35
2. Dasar Hukum Pembagian Harta Warisan.....	36
3. Kedudukan dan Fungsi Harta	42
4. Pembagian Warisan Menurut Fikih Mawaris.....	42

5. Pembagian Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi dan Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Sumber Data	49
D. Metode Pengumpulan Data	50
E. Instrumen Penelitian.....	52
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	53
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANTARA FIKIH MAWARIS DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DITINJAU DARI SEGI PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SENGKANG KELAS I B	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B	55
B. Faktor Penyebab Ahli Waris Mengajukan Gugatan Mereka di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B	62
C. Upaya Yang Dilakukan Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam Menyelesaikan Perkara Tentang Pembagian Warisan	67
D. Pandangan Hakim Terhadap Perbandingan Pembagian Harta Warisan Antara Fikih Mawaris dengan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B.....	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Implikasi Penelitian	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa		es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha		ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal		zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad		es (dengan titik di bawah)
ض	dad		de (dengan titik di bawah)
ط	ta		te (dengan titik di bawah)
ظ	za		zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrop terbalik

غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	,	Apostop
ي	ya	y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ء).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	a	A
ِ	<i>Kasrah</i>	i	I
ُ	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah dan ya	ai	a dan i
ـِ	fathah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَـ	<i>fathah dan alif atau ya</i>		a dan garis di atas
ـِـ	<i>kasrah dan ya</i>	i	i dan garis di atas
ـِـ	<i>dammah dan wau</i>		u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf ّ ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah*(i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ّ (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-Qur'an), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalalah ()

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

NAMA : ANDI WAHYUDI

NIM : 10100113072

JUDUL SKRIPSI : PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERBANDINGAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANTARA FIKIH MAWARIS DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KABUPATEN WAJO (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SENGKANG KELAS I B)

Skripsi ini membahas tentang Pandangan Hakim Terhadap Perbandingan Pembagian Harta Warisan Antara Fikih Mawaris Dengan Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Wajo (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B), Dalam kewarisan terjadi perbedaan pembagian harta warisan antara fikih mawaris dengan kompilasi hukum Islam menyangkut masalah bagian ayah, kakek dan nenek, cucu, ahli waris pengganti, masalah gono-gini serta masalah penyelesaian pembagian harta warisan yang bersifat khusus. Maka dari itu perlu ditelusuri bagaimana pandangan hakim Terhadap Perbandingan Pembagian Harta Warisan Antara Fikih Mawaris Dengan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Sengkang.

Jenis Penelitian ini adalah *field research* kualitatif, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap mengenai perbandingan pembagian harta warisan antara fikih mawaris dengan kompilasi hukum Islam melalui pandangan hakim Pengadilan Agama Sengkang. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologi normatif (*syar'i*) dan pendekatan yuridis, yaitu melihat atau memandang sesuatu dari aspek atau segi hukumnya baik hukum Islam dan hukum berdasarkan undang-undang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *Interview dan Dokumentasi*. *Interview* ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara mewawancarai para informan, wawancara dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Sengkang. Kemudian *Dokumentasi* merupakan pengumpulan data dari dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kewarisan, seperti buku register perkara kewarisan/putusan pengadilan, laporan tahunan, dan sebagainya.

Setelah penelitian ini dilaksanakan menghasilkan kesimpulan bahwa perbandingan pembagian harta warisan antara fikih mawaris dengan Kompilasi Hukum Islam ialah dalam penggunaannya hakim lebih mengutamakan KHI terlebih dahulu dalam proses pembagian harta warisan sebelum kembali ke fikih mawaris, apabila tidak diatur dalam KHI kembali ke fikih mawaris, karena adanya perbedaan antara keduanya sehingga saling melengkapi.

Implikasi penelitian ini adalah diharapkan mampu untuk lebih meningkatkan integritas hakim dalam pengambilan putusan mengenai perkara kewarisan secara adil. Serta untuk memberikan pengetahuan dan masukan kepada masyarakat umum, mahasiswa/(i) dalam bidang hukum Islam serta perangkat peradilan agama dalam memahami perbandingan pembagian harta warisan yang terjadi antara fikih mawaris dengan Kompilasi Hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diyakini sebagai agama penyelamat bagi umat Islam. Agama yang dibawa oleh Rasul serta Nabi terakhir yakni Baginda Rasulullah Muhammad saw. yang akan diingat dan selalu dikenang, bahkan akan terus diwariskan kepada anak cucu umat Islam kedepannya. Bumi dan langit merupakan alam raya yang diciptakan untuk kepentingan manusia, dan manusialah yang mengaturnya melalui petunjuk al-Qur'an, hadis, dan/ atau kitab suci. Allah menurunkan al-Qur'an kepada makhluk-Nya untuk dijadikan sebagai sumber pokok ajaran Islam.¹ Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tiap-tiap manusia akan menghadapi yang namanya problematika kehidupan. Memikirkan apa yang akan terjadi kedepannya, manusia memerlukan upaya untuk mengatasinya yakni upaya hukum, artinya hak yang diberikan kepada seseorang, baik dalam ranah perdata maupun pidana, untuk melakukan perlawanan terhadap putusan hakim secara berjenjang atau bertingkat berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang,² salah satunya yakni melalui jalur hukum.

Salah satu masalah yang hampir tidak lepas dari rana kehidupan ialah masalah pembagian harta warisan itu sendiri. Dimana kadang menjadi rebutan bagi si ahli warisnya sendiri. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu hukum yang mengaturnya yang disebut Hukum Kewarisan.

¹ Supardin, *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 1.

² Rocky Marbun, dkk., *Kamus Hukum Lengkap* (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2012), h. 322.

Fikih Mawaris memiliki makna dan substansi yang sama dengan hukum kewarisan yakni ilmu yang mempelajari tentang siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa-siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya, dan bagaimana cara perhitungannya.³ Sedangkan adapun yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (a) bahwa “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”⁴ Maka dari itu untuk mendapat kepastian hukum mengenai pembagian harta warisan, biasanya pihak-pihak yang bersengketa menyelesaikannya di bawah naungan Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam. Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dijelaskan bahwa “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”⁵ Dalam penyelesaian perkara sendiri melalui beberapa tingkatan yakni, tingkat pertama, tingkat banding, kasasi kemudian PK (Peninjauan Kembali). Peninjauan kembali dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI, salah satunya oleh karena Pengadilan Agama tidak pernah memiliki/diberi wewenang untuk mengeluarkan fatwa atas segala sesuatu,

³ Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Buku Daras Fikih II* (Makassar : Alauddin Press, 2010) ,h. 168.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Cet. I; Grahamedia press, 2014), h. 382.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Cemerlang, 2008), h. 2.

termasuk dalam perkara *a quo*. Pengadilan Agama hanya mempunyai 2 (dua) jenis produk, yaitu *beschikkings* (penetapan) dan *vonis* (putusan), sehingga dalam hal Pengadilan memproduksi penetapan, tetap bertitel “mengadili”.⁶

Adanya hak kewarisan seseorang disebabkan oleh tiga hal menurut fikih mawaris yakni hubungan kekerabatan (nasab), hubungan perkawinan dan hubungan karna *al-wala'* (hubungan karna membebaskan budak). Dalam Pembagian harta warisan sendiri memiliki 6 macam bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, yakni seperdua ($1/2$), sepertiga ($1/3$), seperempat ($1/4$), seperenam ($1/6$), seperdelapan ($1/8$), dan dua per tiga ($2/3$). Inilah yang menjadi acuan bagi ahli waris untuk mengetahui bagiannya masing-masing. Tetapi walaupun demikian, kadang ada pihak yang merasa tidak puas akan hal tersebut. Oleh sebab itu, disinilah letak peran seorang hakim dalam menyikapi permasalahan-permasalahan tersebut. Melihat perbedaan antara Fikih Mawaris dengan Kompilasi Hukum Islam, bahwa bagian tetap pada kakek dan nenek pun tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Walaupun dalam pasal 174 ayat (1) huruf (a) disebutkan bahwa “Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek” dan “Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.”⁷ Dimana kakek dan nenek termasuk ahli waris, namun tidak ada pasal yang menentukan bagian tetap bagi kakek dan nenek, serta baik cucu laki-laki/perempuan dari anak laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-

⁶ Abdul Manaf, *Putusan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perceraian Dan Kewarisan* (Cet. I; Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), h. 227.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, h. 383.

sekandung/seayah (keponakan) serta anak laki-laki dari paman sekandung/seayah (sepupu) tidak disinkronkan lagi dengan adanya Kompilasi Hukum Islam ini. Perbedaan lainnya pun tentang bagian ayah yang pada Fikih Mawaris dia mendapat 1/6 bagian apabila pewaris meninggalkan anak dan mendapat 1/6 *plus ashabah* (sisanya) apabila pewaris tidak meninggalkan anak, lain halnya pada Kompilasi Hukum Islam pasal 177 dinyatakan bahwa “Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian”.⁸ Dengan demikian dalam pasal ini, bagian ayah mendapati perbedaan dalam pembagian harta warisan dan Fikih Mawaris pun tidak mengenal yang namanya ahli waris pengganti serta masalah gono-gini. Belum lagi tentang perbedaan penyelesaian pembagian harta warisan antara Fiqih Mawaris dengan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang perbandingan pembagian harta warisan antara Fikih Mawaris dengan Kompilasi Hukum Islam dan menetapkan judul, yakni: “Pandangan Hakim Terhadap Perbandingan Pembagian Harta Warisan Antara Fikih Mawaris Dengan Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Wajo (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B)”.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B di Kabupaten Wajo. Yang dapat dipahami bahwa fokus penelitian ini berfokus pada

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, h. 384.

perbandingan pembagian harta warisan antara Fikih Mawaris dengan Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Sengkang terhadap perbandingan kedua objek tersebut.

2. Deskripsi Fokus

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan yakni:

“Pandangan Hakim Terhadap Perbandingan Pembagian Harta Warisan Antara Fikih Mawaris Dengan Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Wajo (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B)”

- a. *Pandangan* berasal dari kata pandang yang berarti penglihatan yang tetap dan agak lama.⁹ Pandangan ialah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dsb). Pandangan yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah pandangan yang berupa pendapat.
- b. *Hakim* adalah orang yang mengadili perkara di Pengadilan atau Mahkamah.¹⁰ Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa “Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.”¹¹
- c. *Perbandingan* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah perbedaan (selisih) kesamaan. Maksud dari penulis disini ialah bahwa perbandingan ialah membedakan kesamaan dua objek yang ingin dikaji atau

⁹ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amelia, 2003), h. 309.

¹⁰ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 164.

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*, h. 3.

diteliti lebih mendalam untuk melihat perbedaan yang signifikan pada objek tersebut.

- d. *Pembagian* artinya proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.¹² Maksudnya pembagian disini adalah suatu proses dimana suatu objek yang akan dibagikan kepada beberapa subjek.
- e. *Harta Warisan* dalam ilmu *mawarits*, dikenal dengan kata *Al-Irts*, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli sesudah diambil untuk kepentingan jenazah, pelunasan hutang, serta pelaksanaan wasiat.¹³

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (e), bahwa “Harta Waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”¹⁴ Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Harta Warisan merupakan harta yang sudah bersih dari pengurusan pewaris dan siap dibagikan kepada ahli warisnya.

- f. *Fikih Mawaris* adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa-siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya, dan bagaimana cara perhitungannya.¹⁵

¹² Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 70.

¹³ Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Buku Daras Fikih II*, h. 169.

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, h. 382.

¹⁵ Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Buku Daras Fikih II*, h. 168.

- g. Kompilasi Hukum dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa digunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan, himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.¹⁶

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan *Bagaimana Pandangan Hakim Terhadap Perbandingan Pembagian Harta Warisan Antara Fikih Mawaris Dengan Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Wajo (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B)?*. Dari rumusan pokok masalah tersebut, maka penulis mengangkat sub masalah, yaitu :

1. Apa faktor penyebab ahli waris mengajukan gugatan mereka di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam menyelesaikan perkara tentang pembagian warisan?

D. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang dibutuhkan sebagai referensi atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang akan diteliti, adapun yang diperoleh dari beberapa hasil penelusuran buku-buku yang terkait, diantaranya :

¹⁶ Supardin, *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)*, h. 116.

Dr. Supardin, M.HI. dalam bukunya *Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)* tahun 2014, pada buku ini membahas tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai produk Hukum Nasional serta penjelasan singkat mengenai Hukum Kewarisan. Sedangkan dalam skripsi peneliti membahas tentang Pandangan Hakim Terhadap Perbandingan Pembagian Harta Warisan Antara Fikih Mawaris Dengan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B.

Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag dan Dra. Andi Nurmaya Aroeng, M.Pd. pada bukunya yang berjudul *Buku Daras Fikih II* tahun 2010, dimana dalam bukunya memuat tentang Perkawinan secara umum dalam Islam serta membahas tentang Fiqih Mawaris. Sedangkan dalam skripsi peneliti membahas tentang Pandangan Hakim Terhadap Perbandingan Pembagian Harta Warisan Antara Fikih Mawaris Dengan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B.

DR. H. M. Athoillah, M. Ag. dalam bukunya yang berjudul *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis) Edisi Revisi* tahun 2016, pada buku ini membahas Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam yang meliputi ketentuan umum dalam kewarisan KHI, asas-asas kewarisan KHI, pengelompokan ahli waris KHI, dan prinsip hijab dan mahjub dalam KHI. Sedangkan dalam skripsi peneliti membahas tentang Pandangan Hakim Terhadap Perbandingan Pembagian Harta Warisan Antara Fikih Mawaris Dengan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B.

Pada buku *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* tahun 2014, dimana peneliti memfokuskan terhadap Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang Hukum Kewarisan.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Meninjau dari rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui faktor-faktor penyebab ahli waris mengajukan gugatan mereka di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B.
- b. Mengetahui upaya yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam menyelesaikan perkara tentang pembagian warisan.
- c. Mengetahui pandangan hakim terhadap perbandingan pembagian harta warisan antara Fikih Mawaris dengan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan secara teoritis mampu memberikan pencerahan serta sumbangsih pemikiran bagi masyarakat luas yang berada di setiap daerah dan terkhusus kepada daerah tempat meneliti dan sebagai masukan bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam

- b. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan informasi baru yang bermanfaat kepada masyarakat luas terkait dengan masalah perbedaan pembagian warisan antara fikih mawaris dengan kompilasi hukum Islam serta sebagai bahan masukan bagi praktisi, pegawai, dan hakim di dalam lingkup Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B

dan menjadi arahan bagi masyarakat luas dalam memahami masalah tentang kewarisan.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Umum Tentang Kewarisan Islam

1. Pengertian Waris

Al-Miiraats (الميراث), bentuk jamaknya *al-mawaariits* (المواريث) dan *al-Waarits* (الوارث), jamaknya *al-waratsah* (الورثة), berasal dari akar kata *waritsa-yaritsu- wirtsan wa warsan wa irtsan wa irtsatan wa turaatsan wa miiraatsan* yang menurut bahasa berarti

إِنْنَقَلَ إِلَيْهِ مَالُ فُلَانٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ

Artinya:

Berpindahnya harta seseorang yang telah meninggal kepada orang lain.¹

Menurut istilah Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.²

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam atau lebih disingkat dengan KHI pada buku II tentang Kewarisan pasal 171 huruf (a) menerangkan bahwa Waris atau Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³

¹ M. Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)* (Cet. III; Bandung: Yrama Widya, 2016), h. 1.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h. 13.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Cet. I; Grahamedia press, 2014), h. 382.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa waris atau hukum kewarisan merupakan sebuah aturan yang memuat tentang pemindahan hak kepemilikan harta yang ditinggalkan oleh pewaris (orang yang sudah meninggal) kepada ahli warisnya (orang yang masih hidup) serta mengetahui siapa-siapa ahli waris dengan bagian-bagian yang berhak diterimanya.

2. Hukum Mempelajari, Mengajarkan, dan Membagikan Harta Warisan

a. Hukum Mempelajari dan Mengajarkan Ilmu Waris

Nabi Muhammad SAW. Bersabda :

تَعْلَمُوا الْفَرَائِضَ وَاعْلَمُوا هَآلَ النَّاسِ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يَنْزِعُ مِنْ أُمَّتِي. (رواه ابن ماجه والدارقطني)

Artinya:

Pelajarilah al-faraidh dan ajarkanlah ia kepada orang-orang. Sesungguhnya faraidh itu separuh ilmu, dan ia pun akan dilupakan serta ia pun merupakan ilmu yang pertama kali akan dicabut dikalangan ummatku. (HR. Ibnu Majah dan ad-Daruquthny).

Hukum mempelajari ilmu waris atau ilmu faraidh hukumnya adalah fardhu kifayah, artinya bila sudah ada yang mempelajarinya, gugurlah kewajiban itu bagi yang lain. Ada juga yang mewajibkan mempelajari dan mengajarkannya. Kewajiban belajar dan mengajarkan tersebut dimaksudkan agar di kalangan kaum muslimin (khususnya dalam keluarga) tidak terjadi perselisihan-perselisihan disebabkan masalah pembagian harta warisan yang pada gilirannya akan melahirkan perpecahan/keretakan dalam hubungan kekeluargaan kaum muslimin.⁴

⁴ Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Buku Daras Fikih II* (Makassar : Alauddin Press, 2010) h. 172.

b. Hukum Membagikan Warisan

Hukum Waris merupakan ketentuan Allah yang sudah sangat jelas dan rinci, baik bagian wasiat bukan ahli waris maupun ahli waris penerima bagian tersebut. Setelah Allah menjelaskan pembagian warisan dalam QS. An-Nisa/4, 11-12, selanjutnya Allah memberi kabar gembira dengan surga bagi orang yang taat melaksanakan ketentuan-Nya dan memberi ancaman dengan neraka bagi orang yang membangkang-Nya.

QS. An-Nisa, /4:13

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝⁵

Terjemahnya:

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.

QS. An-Nisa, /4:14

وَمَنْ يَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا
وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝⁶

Terjemahnya:

Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2002), h. 103.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 103

Sebab diturunkannya ayat tersebut ialah pada suatu waktu Rasulullah Saw. yang disertai Abu Bakar Shiddik datang menziarahi Jabir bin Abdillah, yang ketika itu sedang sakit keras di kampung Bani Salamah dengan berjalan kaki. Pada waktu Rasulullah Saw. dan Abu Bakar datang, Jabir bin Abdillah sedang dalam keadaan tidak sadar. Kemudian Rasulullah Saw. segera mengambil air wudhu dan meneteskan beberapa tetes air wudhu tersebut ke atas tubuh Jabir bin Abdillah, sehingga dia sadar. Kemudian setelah sadar Jabir berkata: “Wahai Rasulullah, apakah yang kamu perintahkan kepadaku tentang harta kekayaan?”. Sehubungan dengan pertanyaan Jabir bin Abdillah itu Allah menurunkan ayat ke 11-14 yang dengan tegas memberikan hukum warisan dalam Islam.⁷

Menaati ketentuan Allah dan menjauhi ancaman-Nya terkait dengan hukum waris tersebut menunjukkan bahwa umat Islam diwajibkan melaksanakan pembagian waris berdasarkan al-Qur'an, al-Hadis ataupun Ijma' ulama. Rasulullah menegaskan dengan sabdanya:

أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْقَرَابَةِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ

Artinya:

Bagilah harta warisan antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (Qur'an).(HR. Muslim dan Abu Daud).⁸

Apabila mereka telah menyadari akan bagiannya masing-masing berdasarkan al-Qur'an, Hadis, maupun Ijma' maka mereka dapat secara sukarela serta sepakat melakukan perdamaian, misalnya memberikan bagian dari ahli waris perempuan, kepada ahli waris yang terhibab (terhalang) atau kepada pihak lainnya,

⁷ A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Quran*, (Cet. 1; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 212.

⁸ M. Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, h. 10.

maka diperbolehkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 disebutkan bahwa “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”⁹

3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

a. Asas-Asas Hukum Kewarisan Menurut Fikih Mawaris

Fikih Mawaris atau Hukum Kewarisan Islam atau yang lazim disebut dengan faraidh ini dimana dalam literatur hukum Islam merupakan salah satu dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta pewaris kepada ahli waris. Adapun uraian mengenai Asas-Asas Kewarisan Islam¹⁰ menurut Fikih Mawaris adalah sebagai berikut:

1) Asas Ketauhidan

Asas pertama kewarisan Islam adalah ketauhidan atau prinsip ketuhanan. Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa melaksanakan pembagian waris dengan sistem waris Islam, terlebih dahulu harus didasarkan pada keimanan yang kuat kepada Allah dan Rasulullah SAW., artinya beriman pada ajaran-ajaran-Nya yang termuat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Salah satu ayat al-Qur'an yang menetapkan umat Islam harus taat kepada Allah dan Rasulullah SAW. adalah sebagai berikut:

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, h. 385.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, h. 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا¹¹

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa: 59)

Prinsip ketauhidan berakar dari kalimat tauhid, yakni *la ilaha illa Allah*, sebagaimana tekad keimanan seorang muslim yang tergambar dalam pandangannya yang prinsipil tentang wujud Allah.

2) Asas Keadilan (*Al-‘Adl, Al-Mizan, Al-Qisth*)

Keadilan artinya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak waris laki-laki dan perempuan diberikan secara proporsional. Oleh karena itu, makna keadilan bukan sama rata, melainkan adanya keseimbangan atau *al-mizan* yang disesuaikan dengan hak dan kewajibannya secara proporsional. Prinsip keadilan menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa memiliki hak yang sama dalam memperoleh harta waris menurut pembagian hak atas harta sesuai dengan ketentuan al-Qur’an dan as-Sunnah. Adapun salah satu ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan prinsip keadilan adalah sebagai berikut:

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 114

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾¹²

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa: 58).

Ayat-ayat yang menyerukan prinsip keadilan jumlahnya cukup banyak sehingga keadilan merupakan titik fundamental dalam hukum Islam. Prinsip keadilan secara otomatis akan melahirkan prinsip kebenaran, yakni *al-haq min rabbika fala takunanna min al-mumtarin* (hak yang berasal dari Allah yang sangat meyakinkan).

3) Asas Persamaan

Asas atau prinsip persamaan (*al-musawwah*) merupakan prinsip yang lahir dari adanya prinsip keadilan. Prinsip persamaan dibangun pula oleh adanya hakikat manusia muslim, yakni yang hanya berserah diri kepada Allah. Hal itu berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an, salah satunya:

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا
وَتُبَّ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ¹³

Terjemahnya:

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 113

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 24

Ya Tuhan Kami, Jadikanlah Kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu Kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada Kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji Kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah: 128)

Ayat diatas adalah ketentuan Allah SWT. Tentang prinsip persamaan, yakni persamaan hak di muka hukum. Seluruh orang Islam yang beriman kepada Allah dan semua ajaran-Nya tentu akan mengamalkan prinsip persamaan hak tersebut, khususnya dalam bidang kewarisan Islam. Masalah kewarisan Islam dengan tegas menyatakan bahwa seorang pria mendapat sama dengan dua orang perempuan (An-Nisa ayat 176).

4) Asas Bilateral

Masalah kewarisan berkaitan dengan sistem perkawinan dan sistem kekeluargaan yang dianut oleh suatu bangsa. Ada tiga sistem kekeluargaan yang pada umumnya digunakan oleh masyarakat, yakni :

- a) *Sistem Patrilineal*, yaitu suatu sistem kekeluargaan yang ditarik dari garis bapak.
- b) *Sistem Matrilineal*, adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan langsung dari ibu.
- c) *Sistem Parental (bilateral)*, yang menarik ikatan keturunan dari dua garis , yakni bapak dan ibu.

b. Asas-Asas Hukum Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Istilah Kompilasi Hukum Islam yang disingkat KHI telah menjadi populer dikalangan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Islam dan terkhusus lagi dalam lingkungan Peradilan Agama sejak KHI lahir tanggal 10 Juni 1991 dengan

terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.¹⁴

Asas-asas penting yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam, antara lain dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama¹⁵ adalah sebagai berikut:

- 1) *Asas Bilateral/Parental* yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan (sehingga tidak mengenal kerabat *Dzawil Arham*). Asas ini didasarkan atas:
 - a) Pasal 174 KHI yang menjelaskan kelompok ahli waris baik menurut hubungan darah (golongan laki-laki: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek; gol perempuan: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek) ataupun hubungan perkawinan (duda atau janda). Pasal 174 tidak membedakan antara kakek, nenek, dan paman baik dari pihak ayah atau dari ibu.
 - b) Pasal 185 KHI yang mengatur tentang ahli waris pengganti. Pasal ini menegaskan bahwa *farul waris* (keturunan) pancar perempuan tidak putus waris akan tetapi ia sebagai ahli waris yang mengganti posisi asal (orangtuanya) sehingga cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan/anak laki-laki dari saudara perempuan adalah ahli waris pengganti. Demikian juga orangtua *asal* (orangtua kakek/nenek dan seterusnya ke atas) dan *al-Hawasyi* (ahli waris ke samping/saudara/i ibu atau ayah) dari pancar perempuan adalah ahli waris

¹⁴ Supardin, *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 116.

¹⁵ M. Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, h. 148.

pengganti seperti bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi.

c) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2) *Asas ahli waris langsung* dan *asas ahli waris pengganti* adalah sebagai berikut.

a) Ahli waris langsung (*eigen hoofde*) adalah ahli waris yang disebut pada pasal 174 KHI.

b) Ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahli waris yang diatur dalam pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam pasal 174 KHI. Namun demikian, paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut dalam Pasal 174 KHI.

3) *Asas ijbari*, sepeninggalnya pewaris, ahli waris (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berpikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris.

4) *Asas individual*, harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, kecuali dalam hal harta warisan berupa tanah kurang dari 2 ha (Pasal 189 KHI jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang penetapan Lahan Tanah Pertanian) dan dalam hal para ahli waris bersepakat untuk tidak membagi harta warisan akan tetapi membentuk usaha bersama yang masing-masing memiliki saham sesuai dengan porsi bagian warisan mereka.

- 5) *Asas keadilan berimbang*, perbandingan bagian laki-laki dengan bagian perempuan 2:1, kecuali ahli waris sepakat melakukan perdamaian misalnya antara laki-laki dan perempuan dibagi sama rata, sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 183, “*Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya*”.¹⁶
- 6) *Asas waris karena kematian*, maksudnya terjadinya peralihan hak materiil maupun immaterial dari pewaris setelah ia meninggal dunia.
- 7) *Asas hubungan darah*, yakni hubungan darah akibat perkawinan sah, perkawinan subhat dan atas pengakuan anak (asas fiqh Islam).
- 8) *Asas wasiat wajibah*, maksudnya anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah secara *ex officio* maksimal 1/3 bagian dari harta warisan (pasal 209 KHI).
- 9) *Asas egaliter*, maksudnya kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat *wasiat wajibah* maksimal 1/3 bagian, dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya (Yurisprudensi).
- 10) *Asas Retroaktif Terbatas*, KHI tidak berlaku surut dalam arti jika harta warisan telah dibagi secara riil (bukan hanya pembagian di atas kertas) sebelum KHI diberlakukan, maka keluarga yang mempunyai hubungan

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, h. 385.

darah karena ahli waris pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara riil, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum KHI lahir, dengan sendirinya KHI dapat berlaku surut.

4. Klasifikasi Ahli Waris

a. Klasifikasi Ahli Waris Menurut Fikih Mawaris

Adapun perincian ahli waris, sebagian besar telah dijelaskan Allah SWT. dalam al-Qur'an atau melalui penjelasan Nabi dalam Hadis serta yang dipahami melalui perluasan pengertian ahli waris yang terdapat dalam al-Qur'an tersebut.¹⁷

- 1) Ahli waris kelompok laki-laki berjumlah 15 (lima belas) orang dengan rincian sebagai berikut:¹⁸
 - a) Anak laki-laki (الابن)
 - b) Cucu lk dari anak lk dan seterusnya kebawah (ابن الابن)
 - c) Ayah (الأب)
 - d) Kakek *shahih* dan seterusnya ke atas (الجد من جهة الأب)
 - e) Saudara lk sekandung (الأخ الشقيق) disingkat Sdr. lk I
 - f) Saudara lk seayah (الأخ لأب) disingkat Sdr. lk II
 - g) Saudara lk seibu (الأخ لأم) disingkat Sdr. lk III
 - h) Anak lk dari saudara lk sekandung (ابن الأخ الشقيق)/Keponakan I
 - i) Anak lk dari saudara lk seayah (ابن الأخ لأب)/Keponakan II

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua* (Cet. 5; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), h. 220.

¹⁸ M. Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, h. 78.

- j) Saudara lk ayah (paman) sekandung (العم الشقيق)/Paman I
- k) Saudara laki-laki ayah (paman) seayah (العم لأب)/Paman II
- l) Anak lk dari paman sekandung (ابن العم الشقيق)/Sepupu I
- m) Anak lk dari paman seayah (ابن العم لأب)/Sepupu II
- n) Suami (الزوج)
- o) Laki-laki yang memerdekakan hamba (المعتق)

Tertib ahli waris laki-laki tersebut pada prinsipnya dilihat dari kedekatan kekerabatan di antara mereka, baik jalur *asal* (ke atas), *furu'* (keturunan ke bawah) atau *hawasyi* (ke samping). Ahli waris yang kekerabatannya jauh terhijab oleh ahli waris yang lebih dekat (*aqrab*), kecuali anak, ayah, dan suami tidak dapat terhijab oleh siapa pun.

- 2) Para ahli waris dari kelompok perempuan secara rinci berjumlah 10 (sepuluh) orang, antara lain sebagai berikut:¹⁹

- a) Anak perempuan.
- b) Cucu perempuan dari anak lk dan seterusnya ke bawah.
- c) Ibu.
- d) Nenek yang *shahihah* dan seterusnya ke atas (ibu dari ibu).
- e) Nenek yang *shahihah* dan seterusnya ke atas (ibu dari ayah).
- f) Saudara perempuan sekandung (Sdr I).
- g) Saudara perempuan seayah (Sdr II).
- h) Saudara perempuan seibu (Sdr III).
- i) Istri.

¹⁹ M. Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, h. 97.

j) Perempuan yang memerdekakan budak.

Far'ul waris (keturunan ahli waris) perempuan ini didasarkan pada keturunan keturunan anak laki-laki sehingga cucu perempuan dari anak perempuan tidak termasuk ahli waris, karena ia adalah *far'u ghair waris* (keturunan yang bukan ahli waris) yang dikategorikan *dzawil arham* tingkat pertama.

b. Klasifikasi Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Beda halnya dengan Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan *Asas ahli waris langsung* dan *asas ahli waris pengganti*, secara tekstual ahli waris langsung diatur dalam pasal 174 yang berbunyi:

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.²⁰

Dengan demikian, ahli waris langsung yang disebutkan dalam pasal 174 adalah (1) anak laki-laki, (2) anak perempuan, (3) ayah, (4) ibu, (5) paman, (6) kakek, (7) nenek, (8) saudara laki-laki, (9) saudari perempuan, (10) janda, dan (11) duda. Dari segi pembagiannya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengelompokkan ahli waris ke dalam tiga kategori (1) *Dzawil Furudh* (2) Ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, dan (3) Ahli waris pengganti.²¹

²⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, h. 383.

²¹ M. Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, h. 150.

5. Rukun dan Syarat Kewarisan

Dalam Fiqh Mawaris disebutkan bahwa rukun kewarisan ada tiga,²² antara lain sebagai berikut :

- a. **Pewaris**, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya. Pada penjelasan lain pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup.²³
- b. **Ahli waris**, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya. Walaupun pada kenyataannya ada ahli waris yang tidak mendapat bagian dikarenakan terhibab (terhalang) atau ada sebab yang melarangnya.²⁴
- c. **Harta warisan**, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang tanah, dan sebagainya.

Adapun syarat kewarisan ada tiga, antara lain sebagai berikut:

- a. Meninggalnya seorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal).

Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris baik secara hakiki ataupun secara hukum ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui keberadaannya.

²² Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Buku Daras Fikih II* , h. 181.

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. 4; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 114

²⁴ M. Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, h. 20.

Sebagai contoh, orang yang hilang yang keadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal.

Hal ini harus diketahui secara pasti, karena bagaimanapun keadaannya, manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh harta miliknya. Hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, kecuali setelah ia meninggal.

- b.** Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.

Maksudnya, pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Sebagai contoh, jika dua orang atau lebih dari golongan yang berhak mewarisi meninggal dalam satu peristiwa atau dalam keadaan yang berlainan tetapi tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal maka di antara mereka tidak dapat saling mewarisi harta yang mereka miliki ketika masih hidup. Hal seperti ini oleh kalangan fuqaha digambarkan seperti orang yang sama-sama meninggal dalam suatu kecelakaan kendaraan, tertimpa puing, atau tenggelam. Para fuqaha menyatakan, mereka adalah golongan orang yang tidak dapat saling mewarisi.

- c.** Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.

Dalam hal ini posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli

waris. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Misalnya, kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai *ahlul furudh*, ada yang karena *'ashabah*, ada yang terhalang hingga tidak mendapatkan warisan (*mahjub*), serta ada yang tidak terhalang.

Ketiga rukun dan syarat-syarat tersebut harus terpenuhi. Jika salah satu rukun dan syaratnya tidak ada, maka tidak akan terjadi pewarisan, karena pada dasarnya pewarisan adalah pemindahan kepemilikan harta atau hak (tirkah) seorang (pewaris) kepada orang lain (ahli waris) karena ada sebab pewarisan (hubungan darah, ikatan perkawinan dan pemerdekaan).²⁵

6. Sebab-Sebab Terjadinya Hubungan Kewarisan dan Penghalangnya

Dalam kajian Hukum Islam sesuatu hukum, (termasuk hukum *taklifi*) terjadi dengan segala akibatnya, ditentukan oleh tiga unsur, yaitu sebab, syarat, dan *mani'*. “Sebab” adalah sesuatu yang memberi petunjuk kepada adanya hukum, tergantung kepada adanya hukum, pasti dengan adanya sesuatu itu adanya hukum dan pasti pula dengan tidak adanya sesuatu itu, tidak adanya hukum. “Syarat” adalah sesuatu yang tergantung kepadanya adanya hukum, pasti dengan tidak adanya syarat tidak adanya hukum tetapi tidak pasti dengan keberadaan syarat adanya hukum. “*Mani'*” adalah sesuatu yang dengan keberadaannya, “syarat” dan “sebab” menjadi tidak berarti yang dengan sendirinya hukum tidak

²⁵ M. Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, h. 22.

terjadi. Ketentuan hukum ini berlaku pula pada hukum kewarisan dengan arti harta orang mati beralih kepada orang yang masih hidup bila orang hidup itu mempunyai hubungan dengan orang yang mati, yaitu ada sebab hubungan, terpenuhi syarat hubungan dan tidak ada hal-hal yang menghalanginya untuk menerima peralihan harta itu.²⁶

a. Sebab-Sebab Terjadinya Hubungan Kewarisan

Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris yaitu:²⁷

- 1) *Kerabat hakiki* (yang ada ikatan *nasab*), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman dan seterusnya. Pada penjelasan lain hubungan *al-qarabah* atau disebut juga hubungan *nasab* (darah) yaitu, setiap hubungan persaudaraan yang disebabkan kelahiran (keturunan), baik yang dekat maupun yang jauh. Hubungan *nasab* ini mencakup anak keturunan mayit (*furu al-mayt*) dan leluhur serta anak keturunannya (*furu ushulih*). Mereka akan mendapatkan warisan dengan bagian *fardh* saja seperti ibu, atau *fardh* dengan *'ashabah* seperti bagian ayah atau *'ashabah* saja seperti saudara laki-laki atau dengan sebab *rahm* (*dzawil arham*) seperti paman seibu. Allah berfirman :

....وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ²⁸

Terjemahnya :

“....Dan *dzawil arham* (orang-orang yang mempunyai hubungan) itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah....” (QS. Al-Anfal/8:75).

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*, h. 220.

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, h. 109.

²⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 252

Dengan demikian, hubungan nasab ini mencakup pada ayah dan ibu, anak-anak, saudara, paman (saudara lelaki ayah) dan siapa saja yang ada hubungan nasab dengan mereka.²⁹

- 2) *Pernikahan*, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antara keduanya. Pernikahan sendiri secara luas merupakan *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.³⁰ Adapun menurut syarak “Nikah adalah serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahterah rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.”³¹

Sedangkan dalam UURI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab I pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³² Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi menjadi sebab untuk mendapat hak waris. Dengan sebab akad tersebut, suami mewarisi harta si istri dan istri mewarisi harta suami. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah Swt.:

²⁹ M. Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, h. 22.

³⁰ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 7.

³¹ M.A.Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Cet. 4; Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 8.

³² Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia* (Cet. 6; Jakarta: Cemerlang, t.th.), h. 2.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

Terjemahnya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu....” (QS. An-Nisa/4: 12)

.... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

Terjemahnya:

“.... Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan” (QS. An-Nisa/4: 12)

Adapun nikah *fasid* yang telah disepakati seperti nikah tanpa saksi, nikah batal seperti nikah *mut'ah* tidak termasuk nikah syar'i maka pernikahan tersebut tidak menjadi sebab saling mewarisi; sedangkan nikah *fasid* yang *mukhtalaf* (tidak disepakati) seperti nikah tanpa wali, maka menurut sebagian ulama boleh saling mewarisi antara suami istri karena *syubhat al khilaf* dan menurut ulama lainnya tidak saling mewarisi karena pernikahan tersebut *fasad* (cacat hukum).³³

3) *Al-Wala'*, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Maksudnya ialah jaminan hak mewarisi yang diberikan kepada orang yang membebaskan budaknya. Ini diberikan karena sesungguhnya orang yang melepaskan budak telah mengangkat nilai kemanusiaan dan mengembalikan kebebasan dan martabat seseorang sebagai manusia.³⁴ Jika seorang tuan tidak meninggalkan ahli waris dan tidak meninggalkan *ulul arhaam*, tetapi meninggalkan seorang

³³ M. Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, h. 23.

³⁴ Muammar M. Bakry, *Akuntansi Dasar Mawaris (Cara Cepat Membagi Harta Pusaka secara Syar'i)* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 16.

hamba yang ia merdekakan, maka hartanya diberikan kepada hambanya itu sesuai sabda Nabi SAW.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا تَوَفِّيَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ص م وَلَمْ يَتْرُكْ وَارثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ

Artinya:

Dari Ibnu Abbas : Bahwasanya seorang laki-laki mati dizaman Rasulullah Saw., dengan tidak meninggalkan ahli waris kecuali seorang hamba yang ia telah merdekakan, maka Rasulullah berikan padanya peninggalan itu. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Namun untuk masa sekarang ini, sebab *al-wala'* ini secara otomatis tidak terealisasi lagi sebab perbudakan sendiri sudah tidak ada lagi. Di samping tiga sebab pewarisan tersebut, ulama al-Syafi'iyah dan ulama Malikiyah menambahkan sebab keempat yaitu *jihat al-Islam* (hubungan saudara seagama) dalam pelaksanaannya apabila tidak ada ahli waris dengan tiga sebab di atas, maka harta warisan atau sisa warisan yang tidak dihabiskan oleh ahli waris (*'ashabah*) maka diserahkan kepada *bait al-mal* (kas negara).³⁵

b. Sebab-Sebab yang Menghalangi Menerima Warisan

Tidak semua ahli waris bisa mendapatkan harta warisan. Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang menjadi gugur mendapatkan harta warisan. Faktor gugurnya hak mewarisi maksudnya kondisi yang menyebabkan hak waris seseorang menjadi gugur, yang pada garis besarnya terbagi dalam dua faktor utama,³⁶ antara lain :

1) Faktor sifat (*mawani'ul irtsi*)

³⁵ M. Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, h. 24.

³⁶ Abdillah Mustari, *Hukum Waris (Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata Barat)* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 54.

Orang yang gugur haknya karena sifat tersebut disebut *mamnu'* atau *mahrum*. Faktor sifat itu terdiri atas tiga sifat, yaitu:

- a) **Pembunuhan.** Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewarisnya menyebabkan ia terhalang haknya untuk mewarisi.³⁷ Hal ini didasarkan pada riwayat dari Ibn Abbas r.a:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَّعَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدُهُ أَوْ وَلَدُهُ فَلَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ (رواه احمد)

Artinya:

Rasulullah SAW. bersabda: “Barangsiapa membunuh korban, maka ia tidak berhak mewarisinya, meskipun korban tidak mempunyai ahli waris lainnya selain dirinya, baik itu orang tuanya, atau anaknya maka bagi pembunuh tidak berhak atas warisan. (HR. Ahmad)

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri pada pasal 173 berbunyi:³⁸

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Rumusan tersebut cukup lengkap dan dapat merangkum kategori atau klasifikasi pembunuhan dalam terminologi fiqh seperti pembunuhan sengaja (*al-'amd*) atau menyerupai sengaja (*syibh al-'amd*). Adapun huruf b, fitnah dijadikan sebagai penghalang mewarisi didasarkan atas

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Cet. 3; Jakarta: Rajawali Pers, 1998), h. 402

³⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, h. 383.

interpretasi analogis yang dapat dipersamakan dengan pembunuhan itu sendiri.³⁹

- b) Berlainan Agama.** Seorang muslim tidak dapat mewarisi harta warisan orang non muslim walaupun ia adalah orang tua atau anak, dan begitu pula sebaliknya. Dasar hukum berlainan agama sebagai penghalang dalam saling mewarisi ditegaskan Rasulullah Saw., dalam sabdanya:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim. (HR. Bukhari dan Muslim)

Kompilasi tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. Kompilasi hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris (ps. 171 huruf c).⁴⁰ Agar dapat mengetahui ahli waris beragama Islam, maka pada Pasal 172 menyatakan bahwa:

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Sedangkan identitas pewaris dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal 171 huruf b, yakni “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan

³⁹ Muchith A. Karim, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), h. 97.

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, h. 404

Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”⁴¹

- c) **Budak.** Seseorang yang berstatus sebagai budak (yang belum merdeka) tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Allah SWT. berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

Terjemahnya:

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun (QS. An-Nahl, 16:75)

Kompilasi tidak membicarakan masalah ini, tentu saja karena perbudakan tidak dikenal dalam sistem hukum dan nilai-nilai hukum yang ada di Indonesia.⁴²

2) Faktor Kekerabatan

Dimaksud dengan penggugur karena faktor kekerabatan bahwa orang yang memenuhi syarat dan memiliki sebab untuk menerima warisan, tetapi karena kehadiran ahli waris lain yang menyebabkan terhalang untuk memperoleh bagiannya yang banyak menjadi sedikit atau bahkan terhalang sama sekali, orang yang demikian disebut *Mahjub*. Sedangkan *Hijab* adalah penghalang atau dinding yang merintangi *mahjub* sehingga tidak memperoleh warisan. Hijab karena faktor kekerabatan sendiri terbagi dua, yaitu:

⁴¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, h. 383.

⁴² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, h. 406

- a) *Hijab Hirman*, merupakan penghalang yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak memperoleh warisan sama sekali karena terdapat ahli waris yang lebih berhak.⁴³
- b) *Hijab Nuqshan*, merupakan penghalang yang menyebabkan berkurangnya bagian seorang ahli waris tertentu, karena ada ahli waris lain yang juga berhak.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembagian Harta Warisan

1. Pengertian Harta Warisan

Secara etimologis harta dalam bahasa Arab disebut مَال yang berasal dari akar kata مَال يَمِيلُ مَيْلًا yang berarti condong, cenderung dan miring. Hal ini mengisyaratkan bahwa tabiat manusia cenderung ingin memiliki dan menguasai harta.⁴⁴

Harta warisan adalah benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris. Harta itu adalah sisa setelah diambil untuk pelbagai kepentingan, yaitu biaya perawatan jenazah, hutang-hutang dan penunaian wasiat.⁴⁵

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan pasal 171 huruf (e) menyatakan bahwa “Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan

⁴³ A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh (Tanya Jawab Hukum Waris Islam)* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2016), h. 31.

⁴⁴ M. Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, h. 6.

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas* (Cet. I; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h. 25.

pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tahjiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”⁴⁶

2. Dasar Hukum Pembagian Harta Warisan

Adapun yang menjadi dasar hukum serta sumber utama dari pembagian harta warisan itu sendiri, berasal dari *nash* atau teks dalam al-Quran dan al-Hadis, selain daripada itu adapula al-Ijma dan al-Ijtihad. Adapun perinciannya sebagai berikut:

a. Al-Quran

QS. An-Nisaa’/4:7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا⁴⁷

Terjemahnya:

Laki-laki akan memperoleh bagian dari apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan keluarga dekatnya, dan perempuan akan memperoleh bagian dari apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan keluarga dekatnya, baik itu banyak ataupun sedikit, (itu adalah) bagian yang telah ditetapkan.

Sebab turunnya ayat ini pada saat salah satu sahabat Nabi Saw. meninggal dunia. Sepupu-sepupunya membagi kekayaan di antara mereka sendiri walaupun dia meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Mereka tidak memberikan sesuatu pun kepada istri dan anak-anaknya. Sesuai dengan kebiasaan mereka, yang terpengaruh oleh kebiasaan zaman jahiliah, hanya mereka yang mempunyai kekuatan untuk berperang sajalah yang berhak mewarisi. Lantas, menanggapi

⁴⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, h. 384.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadis)* (Cet. 5; Bandung: Cordoba International-Indonesia, 2016), h. 78.

kesedihan istri lelaki itu, dan setelah menerima wahyu Ilahi tersebut, Rasulullah memanggil para sepupu itu dan memerintahkan mereka untuk mengembalikan harta itu kepada ahli waris yang sah.

Adapun tafsir QS. An-Nisaa'/4:7 adalah sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam, bukan hanya laki-laki yang memiliki hak waris, tetapi juga perempuan, dan agama Islam juga melindungi hak-hak kaum perempuan.

“Laki-laki akan memperoleh bagian dari apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan keluarga dekatnya, dan perempuan akan memperoleh bagian dari apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan keluarga dekatnya...”

2. Dalam agama ini, pembagian waris yang berdasarkan kekuatan dan kemampuan berperang dilarang.

3. Yang utama adalah pembagian waris yang adil, bukan jumlahnya.

“...baik itu banyak ataupun sedikit...”

4. Standar bagian waris itu bervariasi.

“...(itu adalah) bagian yang telah ditetapkan.”⁴⁸

Ketentuan pada ayat ini merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam harta warisan. Ayat ini juga mengakui bahwa laki-laki dan perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.⁴⁹

QS. An-Nisaa'/4:11:

⁴⁸ Allamah Kamal Faqih Imani dan tim ulama, *Tafsir Nurul Quran: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Quran*, Jilid 3 (Cet. I; Jakarta: Al-Huda, 2003), h. 466-467.

⁴⁹ Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam: Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 17.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

QS. An-Nisaa'/4:12:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ

كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ٥٠

Terjemahnya:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

QS. An-Nisaa'/4:176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadis)*, h.

أَتْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ^ج وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ^ف يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^{١٧٦}

Terjemahnya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

b. Al-Hadis

- 1) Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Imam Bukhari dan Muslim:

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْجِفُوا
الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya:

Berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat. (HR. Bukhari Muslim).

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

Artinya:

Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang muslim. (Muttafaq 'alaih)

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadis)*, h.

- 2) Hadis riwayat Ibn Mas'ud yang menjelaskan bahwa saudari (kandung atau seayah) yang bersamaan dengan anak perempuan dapat bagian sebagai 'ashabah ma' al-ghair.

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْإِبْنَةِ النِّصْفَ وَلِلْإِبْنَةِ الْإِثْنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةً لِلثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ (رواه الجماعة الإسلامية والنسائي)

Artinya:

Nabi SAW. menetapkan 1/2 (setengah) bagi anak perempuan dan 1/6 (seperenam) bagi cucu perempuan (dari anak laki-laki) sebagai penyempurna bagian 2/3 (dua per tiga), sisanya bagi saudari. (HR. Jama'ah kecuali Imam Muslim dan Nasai)

c. Al-Ijma'

Permasalahan waris yang belum dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis didasarkan pada Ijma sahabat dan tabi'in serta hasil Ijtihad (Qiyas) para ulama.⁵²

d. Al-Ijtihad

Yaitu pemikiran para sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam pembagian harta warisan. Yang dimaksud di sini ijtihad dalam menerapkan hukum, bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada.⁵³

⁵² M. Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, h. 6.

⁵³ Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Buku Daras Fikih II*, h. 179.

3. Kedudukan dan Fungsi Harta

Kedudukan dan Fungsi Harta bagi kehidupan manusia telah ditunjukkan dengan jelas dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, antara lain sebagai berikut⁵⁴:

- a. Harta untuk Memenuhi Kebutuhan dan Kesenangan Manusia
- b. Harta Sebagai Perhiasan Hidup
- c. Harta Berfungsi Sosial untuk Kemaslahatan Orang Lain
- d. Harta Sebagai Bahan Ujian (Fitnah) bagi Pemiliknya
- e. Harta Sebagai Peninggalan (Tirkah)
- f. Harta Sebagai Objek yang Harus Dicari, Dimiliki dan Dikuasai untuk Keseimbangan Hidup Dunia dan Akhirat.

4. Pembagian Warisan Menurut Fikih Mawaris

Hak-hak ahli waris dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti.⁵⁵ Bagian-bagian tersebut telah ditentukan di dalam al-Qur'an, Hadis maupun Ijma'. Bagian-bagian tersebut berikut ahli waris yang berhak sebagai berikut:⁵⁶

a. Pertama, Seperdua (1/2)

Para ahli waris yang mendapat 1/2 terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu:

- 1) Anak perempuan, apabila hanya seorang diri, jika si mati (pewaris) tidak meninggalkan anak laki-laki (QS. 4:11).
- 2) Seorang cucu perempuan dari laki-laki, jika si mati (pewaris) tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki.

⁵⁴ M. Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, h. 42.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*, h. 43.

⁵⁶ Muammar M. Bakry, *Akuntansi Dasar Mawaris (Cara Cepat Membagi Harta Pusaka secara Syar'i)*, h. 35.

- 3) Seorang saudara perempuan sekandung apabila seorang diri.
- 4) Seorang saudara perempuan seayah, jika hanya seorang diri.
- 5) Suami, jika tidak ada anak atau cucu (QS. 4:12).

b. Kedua, Seperempat (1/4)

Para ahli waris yang mendapat $\frac{1}{4}$ terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu:

- 1) Suami, jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki (QS. 4:11).
- 2) Istri seorang atau lebih, jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu (QS. 4:12).

c. Ketiga, Seperdelapan (1/8)

Para ahli waris yang mendapat $\frac{1}{8}$ hanya 1 (satu) orang, yaitu:

- 1) Istri seorang atau lebih, apabila ada anak atau cucu (QS. 4:12).

d. Keempat, Sepertiga (1/3)

Para ahli waris yang mendapat $\frac{1}{3}$ terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu:

- 1) Ibu, jika si mati (pewaris) tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki atau dua orang saudara (QS. 4:11).
- 2) Dua orang atau lebih saudara seibu bagi si mati (pewaris), baik laki-laki maupun perempuan (QS. 4:12).

e. Kelima, Dua pertiga (2/3)

Para ahli waris yang mendapat $\frac{2}{3}$ terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu:

1. Dua orang anak perempuan atau lebih, jika mereka tidak mempunyai saudara laki-laki (QS. 4:11).
2. Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, jika mereka tidak ada anak perempuan atau saudara laki-laki.

3. Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, jika si mati (pewaris) tidak meninggalkan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau saudara laki-laki mereka (QS. 4:176).
4. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih, jika tidak ada yang tersebut nomor 1, 2 dan 3 atau saudara laki-laki mereka.

f. Keenam, Seperenam (1/6)

Para ahli waris yang mendapat 1/6 terdiri 7 (tujuh) orang, yaitu:

- 1) Ayah, jika si mati (pewaris) meninggalkan anak atau cucu (QS. 4:11).
- 2) Ibu, jika si mati (pewaris) meninggalkan anak, cucu laki-laki atau saudara laki-laki/perempuan lebih dari seseorang.
- 3) Kakek, jika si mati (pewaris) meninggalkan anak, cucu dan tidak meninggalkan bapak.
- 4) Nenek, jika si mati (pewaris) tidak ada ibu.
- 5) Cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama-sama seorang anak perempuan
- 6) Saudara perempuan seayah atau lebih bila ia bersama-sama saudara perempuan sekandung.
- 7) Saudara seibu baik laki-laki/perempuan, jika si mati (pewaris) tidak meninggalkan anak, bapak atau kakek.

5. Pembagian Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam⁵⁷ telah diatur tentang besarnya bahagian yang diterima oleh masing ahli waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 176 sampai dengan Pasal 182, Pasal 185 dan 190 antara lain:

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih.

Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian

⁵⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, h. 384-385

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 185

- (1) Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah *field research* kualitatif dengan deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹ Yang mana diharapkan mampu untuk memberi gambaran yang menyeluruh tentang pandangan hakim terhadap perbandingan pembagian harta warisan antara Fikih Mawaris dengan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B. Setelah gambaran tersebut diperoleh, kemudian dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang terfokus untuk memecahkan masalah serta mengikuti langkah-langkah yang logis, terorganisasi dan ketat untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data serta menarik suatu kesimpulan yang lengkap dan akurat.

2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil lokasi sesuai dengan judul skripsi “Pandangan Hakim Terhadap Perbandingan Pembagian Harta Warisan Antara Fikih Mawaris Dengan Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Wajo (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B)”. Sehingga berdasarkan skripsi ini, maka lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama

¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. 7; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 105.

Kelas I B Sengkang. Guna memperoleh data serta informasi yang akurat dalam penyusunan skripsi ini.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini ialah pendekatan teologi normatif (*syar'i*) dan pendekatan yuridis. Pendekatan teologi normatif (*syar'i*) sendiri merupakan pendekatan yang dilakukan melalui penelusuran syariat Islam seperti al-Qur'an maupun Hadis yang terkait dengan skripsi ini. Sedangkan pendekatan yuridis di sini adalah dari segi aspek *comparative approach* (pendekatan perbandingan) yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum² antara hukum Islam dengan hukum positif yakni Fikih Mawaris dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pembagian harta warisan melalui pandangan hakim Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini, yakni:

1. **Data Pustaka** menggunakan *library research* yaitu metode yang dilakukan dengan cara membaca beberapa literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian, dalam hal ini bahan-bahan penelitian yang terkait dengan kepustakaan adalah:

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Cet. 8; Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 172.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian,³ diantaranya adalah:

- 1) Undang-Undang RI nomor 50 Tahun 2009, (Perubahan kedua atas Undang-Undang RI no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
- 2) Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang Hukum Kewarisan.
- 3) Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

2. **Data lapangan** melalui *field research*, yaitu bahan atau data yang diperoleh dari lapangan selain daripada buku, kitab, majalah, jurnal dan lain-lain.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti mengenai lokasi penelitian di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B, Kabupaten

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. 7; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 105.

Wajo, Sulawesi Selatan yang diikuti dengan pencatatan sistematis terhadap semua gejala yang akan diteliti. Observasi tidak hanya terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain. Dari segi prosesnya observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan (peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati), dan observasi non partisipan (tidak terlibat dan hanya sebagai peneliti independen), dan dari segi instrumentasi yang digunakan maka dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur (dirancang sistematis) dan tidak terstruktur (tidak dipersiapkan secara sistematis). Adapun teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi non partisipan dalam artian peneliti hanya mengamati masyarakat yang sedang menghadiri sidang kewarisan di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B tanpa mengikuti rangkaian persidangnya.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dan jika peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang "*Open ended*" (wawancara yang jawabannya tidak terbatas pada satu tanggapan saja) dan mengarah pada pedalaman informasi serta dilakukan tidak secara formal terstruktur. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan hakim di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I B Sengkang serta guna memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembagian harta warisan.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti Akte, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Adapun dokumen yang akan diteliti adalah dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kewarisan, seperti buku register perkara, akta putusan pengadilan, laporan bulanan, dan lain sebagainya.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan bertujuan untuk memperoleh data yang akurat tentang bagaimana pandangan hakim terhadap perbandingan pembagian harta warisan antara Fikih Mawaris dengan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B di Kabupaten Wajo. Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah Pedoman Wawancara yaitu Salah satu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa daftar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh data atau informasi tentang faktor penyebab ahli waris mengajukan gugatan mereka di Pengadilan Agama Sengkang, bagaimana upaya yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam menyelesaikan perkara tentang pembagian warisan dan hal-hal lain yang berkenaan dengan penelitian ini. Informasi dapat diperoleh dengan wawancara langsung dan wawancara tertulis dengan para hakim dan panitera Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B. Selain daripada itu peneliti juga memerlukan kamera, alat perekam

suara (handphone), serta alat tulis menulis seperti pulpen dan buku dalam melaksanakan penelitian ini.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasi dan mengurut data kedalam pola, kategori dan satu uraian besar. Tujuan analisis data ialah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca. Teknik pendekatan deskriptif kualitatif merupakan suatu proses menggambarkan keadaan sasaran yang sebenarnya, penelitian secara apa adanya sejauh apa yang peneliti dapatkan dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan populasi yang sedang diteliti.

Untuk menganalisis data yang terkumpul nanti agar memperoleh kesimpulan yang valid maka digunakan teknik pengolahan dan analisis data dengan metode kualitatif. Adapun teknik dan interpretasi data yang akan digunakan yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Peneliti mengolah teori ataupun informasi untuk mendapatkan kejelasan pada masalah. Baik data yang terdapat di lapangan maupun yang terdapat di kepustakaan. Data yang dikumpulkan dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan yang dirumuskan

dalam penelitian. Kemudian dilakukan pengolahan dengan meneliti ulang data yang diperoleh.

2. Display data

Display data adalah penyajian dan pengorganisasian data ke dalam satu bentuk sehingga terlihat utuh. Dalam penyajian data dilakukan secara induktif yakni menguraikan setiap permasalahan dalam permasalahan penelitian dengan memaparkan secara umum kemudian menjelaskan secara spesifik.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan verifikasi, setiap kesimpulan awal masih merupakan kesimpulan sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama di lapangan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANTARA FIKIH MAWARIS DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DITINJAU DARI SEGI PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SENGKANG KELAS I B

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B

Kantor Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B, pada awal mulanya dibangun pada tahun 1980 di atas areal tanah seluas 543 m² yang berlokasi di Jl. Sultan Hasanuddin No. 15 Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian pada tanggal 21 April 2008 mengalami perpindahan lokasi kantor baru di Jl. Beringin I Sengkang, yang telah diresmikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 27 Agustus 2008. Adapun dasar hukum, sejarah berdirinya dan wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B adalah sebagai berikut:¹

1. Dasar Hukum Terbentuknya Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B

Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura. Selanjutnya mengalami perkembangan dan perubahan hingga dikeluarkannya Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat sebagai realisasi dari pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957.

¹ Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B

2. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Sengkang

Berdirinya Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo dapat kita lihat pertama kali pada pasal 1 Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'ah di luar Jawa dan Madura yang berbunyi “di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri “.

Selanjutnya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tersebut menentukan nama-nama tempat di mana akan dibentuk Pengadilan Agama /Mahkamah Syari'ah dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Sengkang tercantum dalam daftar-daftar nomor Pengadilan Agama /Mahkamah Syari'ah.

Namun demikian bukan berarti secara otomatis Pengadilan Agama sengkang Kabupaten Wajo telah terbentuk, sebab pada pasal 12 dari Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan “ pelaksana dari peraturan ini diatur oleh menteri Agama “.

Kemudian pada tanggal 6 Maret 1950 keluarlah Penetapan menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat sebagai realisasi dari pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Dalam penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tersebut menetapkan bahwa dalam nomor urut 17 (tujuh belas) akan di bentuk Pengadilan Agama /Mahkamah Syari'ah Sengkang Kabupaten Wajo.

Akan tetapi dengan dasar penetapan Menteri Agama tersebut Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Sengkang Kabupaten Wajo belum dapat melaksanakan tugasnya sebagai salah satu badan peradilan yang resmi karena di samping belum ada kantornya juga belum ada pegawainya. Barulah pada tahun 1959 diangkat 3 (tiga) orang pegawai Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo, tetapi masih terbentur pada masalah belum adanya pejabat Ketua yang ditunjuk sebagai pimpinan, sehingga Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo pada waktu itu belum dapat berjalan. Dan nanti pada tanggal 1 Juni 1960 Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo resmi terbentuk baik dari segi yuridis formil maupun dari segi kenyataan, karena pada waktu itu Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo diresmikan dan sekaligus pelantikan Bapak K.H.hamzah badawi sebagai panitera merangkap Pejabat Ketua berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama No : C/lim-17/1396 tanggal 3 Maret 1960 terhitung mulai tanggal 1 Maret 1960 sebagai pindahan dari pegawai Kantor Urusan Agama Kabupaten Wajo.²

3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B

Kabupaten Daerah Tk II Wajo Propinsi Sulawesi-Selatan adalah daerah yurisdiksi PA Sengkang yang memiliki luas wilayah .2.506,19 km² yang terdiri atas 14 Kecamatan, 175 Kelurahan dan Desa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara kabupaten Luwu
- Sebelah Selatan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone.
- Sebelah Timur Teluk Bone.
- Sebelah Barat Kabupaten Soppeng dan Kabupaten sidrap.

² Sumber data: Kantor Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B

NO.	KECAMATAN	IBU KOTA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/DESA
1	Sabbangparu	Kota Baru	15
2	Tempe	Siengkang	16
3	Pammana	Maroanging	15
4	Bola	Solo	10
5	Takkalalla	Peneki	13
6	Sajoanging	Jalang	9
7	Penrang	Doping Baru	10
8	Majauleng	Paria	18
9	Tanasitolo	Tancung	19
10	Belawa	Menge	9
11	Maniangpajo	Anabanua	8
12	Gilireng	Gilireng	9
13	Keera	Keera	10
14	Pitumpanua	Siwa	14

Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B



4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B

VISI:

**“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SENGKANG SEBAGAI
BAGIAN PENGADILAN INDONESIA YANG AGUNG”**

MISI:

Misi Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan yang transparan, cepat dan tepat waktu.
2. Mewujudkan kinerja yang professional.
3. Mewujudkan pembinaan dan pengawasan yang berkualitas

Visi Pengadilan Agama Sengkang sebagai bagian Peradilan yang Agung bermakna sebagai pancaran aura dinamika, lembaga, sumber daya manusia dan performa pelayanan masyarakat yang mengagumkan. Prilaku sebagian hakim yang merendahkan keagungan berpengadilan dengan dalih kebebasan hakim,

sehingga perbuatan, ucapan dan perilaku hakim perlu dikontrol. Dalam hal Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengambil langkah regulasi antara lain Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk membuat pribadi Hakim tangguh dan tidak mudah diintervensi dari pihak manapun, dari hal tersebut sangat diharapkan dapat menghilangkan sorotan, kritikan dan reaksi negatif dari publik untuk mendapatkan kepercayaan demi terwujudnya peradilan yang agung.

5. Kewenangan Hukum Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B

Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B memiliki kewenangan hukum yang serupa dengan Pengadilan Agama lainnya yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan, (b) kewarisan, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) shadaqah dan (i) ekonomi syari'ah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama melengkapi kompetensi Peradilan Agama dengan menambahkan beberapa kewenangan hukum diantaranya:

1. Pengangkatan anak,

2. Zakat, Infaq,
3. Ekonomi Syari'ah.

Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah antara lain meliputi:

1. Bank syari'ah.
2. Lembaga keuangan mikro syari'ah.
3. Asuransi syari'ah.
4. Reasuransi syari'ah.
5. Reksadana syari'ah.
6. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah.
7. Sekuritas syari'ah.
8. Pembiayaan syari'ah.
9. Pegadaian syari'ah.
10. Dana pensiun lembaga keuangan syariah dan
11. Bisnis syari'ah.

Penambahan kewenangan tersebut merupakan suatu kekuatan untuk memberikan pelayanan hukum secara optimal kepada masyarakat Kabupaten Wajo yang mayoritas beragama Islam.³

³ Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B

B. Faktor Penyebab Ahli Waris Mengajukan Gugatan Mereka di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B

Islam bukan hanya berisi ajaran tentang keimanan dan berbagai hal yang harus dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah, tetapi juga mengandung aturan tentang interaksi antara individu di dunia yang disebut *mu'amalat*-dalam artinya yang umum-termasuk aturan tentang pembagian warisan. Sebagai manifestasi keimanannya, seorang Muslim wajib mematuhi dan menjalankan berbagai aturan tersebut (termasuk hukum waris). Di antara aturan Islam tersebut, ada yang sejalan dengan apa yang selama ini mereka ikuti sehingga mudah bagi mereka untuk meninggalkan yang lama dan mengikuti yang baru. Ada pula yang berbeda sehingga pelaksanaannya pun menghadapi beberapa kendala dan penyesuaian.⁴

Sehingga hal tersebutlah yang memicu hubungan kekeluargaan yang pada awalnya berjalan dengan bahagia dan harmonis, kemudian berakhir dengan keretakan yang terjadi di dalamnya. Adapun faktor yang mendasari sehingga penggugat mengajukan gugatan mereka di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B adalah sebagai berikut:

1. Hak Penggugat Diambil Ahli Waris Yang Lain.

Berdasarkan gugatan yang dilakukan penggugat (anak kandung pewaris) melawan tergugat (ibu tiri/istri kedua pewaris) dengan perkara nomor 661/Pdt.G/2016/PA.Skg mengajukan gugatan dengan salah satu alasan “bahwa keseluruhan budel waris yang menjadi obyek sengketa didalam perkara ini

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua* (Cet. 5; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), h. 40.

dikuasai oleh tergugat dimana penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan karenanya penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan.” Hal ini pulalah yang menjadi salah satu faktor yang terjadi dalam sebuah keluarga terkait masalah warisan. Dimana ahli waris merasa haknya diambil atau dikuasai oleh ahli waris yang lainnya, sehingga menyebabkan kerugian bagi dirinya. Atas dasar tersebutlah maka pihak yang dirugikan ini mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B.

2. Terjadi Perbedaan Persepsi Antara Sesama Ahli Waris.

Perbedaan persepsi atau pemahaman bukanlah sesuatu yang baru di kalangan masyarakat, melainkan sesuatu hal yang sudah dianggap biasa. Namun bagaimana jadinya apabila perbedaan persepsi ini terjadi pada masalah pembagian warisan, sehingga menyebabkan permasalahan yang cukup serius bagi sesama ahli waris. Maka dari itu hal tersebut membutuhkan penanganan yang serius pula dalam penyelesaiannya. Sehingga hal ini dapat menjadi salah satu alasan bagi pihak penggugat mengajukan gugatan mereka di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B.

3. Adanya Ahli Waris Yang Mengambil Bagian Lebih Dari Yang Lain

Hak-hak ahli waris dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti. Angka pasti tersebut dinyatakan dalam al-Qur'an, sebagai sumber dan rujukan utama bagi hukum kewarisan. Bagian menurut angka yang pasti itu disebut dalam kitab-

kitab fikih dengan *faridhah* dengan bentuk jamak “*faraid*”.⁵ Tetapi ahli waris yang tidak memahami masalah *faraid* akan mengalami kesulitan dalam mengetahui bagian yang diterimanya, sehingga mengambil bagian yang lebih daripada seharusnya.

4. Pihak Yang Memiliki/Menguasai Objek Tidak Mau Membagi Secara Sukarela Dengan Pihak-Pihak Yang Lain

1. Hal yang mendasari ahli waris mengajukan gugatan mereka menurut Drs. Idris, M.HI. adalah bahwa karena penggugat merasa dizalimi haknya dan karena pihak yang menguasai barang tidak mau membagi secara sukarela dengan pihak-pihak yang bersengketa.⁶ Sebagaimana hal tersebut sejalan dengan gugatan penggugat selaku ahli waris perkara kewarisan nomor 661/Pdt.G/2016/PA.Skg. yang gugatan berbunyi “Bahwa oleh karena gugatan penggugat dalam perkara ini didukung dengan alat bukti yang kuat menurut hukum dan untuk mencegah berlarut-larutnya tergugat menguasai obyek sengketa. Sehingga patut dan berdasar hukum jika putusan pada perkara ini dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya”.

Kepemilikan harta dapat dilihat dari sebab-sebabnya, yaitu *Ihrazul mubahat* (menguasai barang mubah dengan maksud memiliki); *al-uqud* (transaksi); *al-khalafiyah* (pewarisan), dan *al-tawallud min al-mamluk* (beranak pinak). *Khalafiyah* (Pewarisan) menurut term fikih adalah:

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*, h. 43.

⁶ Hasil wawancara dengan Drs. M. Idris, M.HI. Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 8 Juni 2017

شَيْءٌ جَدِيدٌ مَحَلٌّ قَدِيمٌ زَائِلٌ فِي الْحُقُوقِ.

Artinya:

Bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat dan lama yang telah hilang, pada berbagai macam hak

Khalafiyah ini ada dua macam antara lain sebagai berikut:⁷

a. *Khalafiyah Syakhsy 'an Syakhsy (Irts)*

Irts adalah khalafiyah dimana si waris (penerima harta warisan) menempati tempat *muarrits* (orang yang mewariskan) dalam memiliki *tirkah* (harta yang ditinggalkannya) dan permasalahan yang terkait dengan *tirkah*. Maka apabila yang meninggal tidak meninggalkan harta atau harta itu kurang dari jumlah utangnya, maka si waris tidak bertanggung jawab terhadap utang itu, karena *irts* sebab untuk memiliki harta, bukan sebab membayar utang-utang si *muwarrits*. Dalam perundang-undangan di Indonesia disebutkan bahwa *irts* (pewarisan) merupakan salah satu sebab beralihnya kepemilikan harta ataupun hak. Secara khusus terkait dengan Hak Kekayaan Atas Intelektual dijelaskan bahwa hak dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya atau sebagiannya dengan cara: a. pewarisan, b. hibah, c. wasiat, d. perjanjian tertulis dan e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan juga bahwa "Pewarisan hanya terjadi karena kematian".

b. *Khalafiyah Sya'i'an Syai in* atau *Tadlmin/ta'widl* (Menjamin Kerugian)

Apabila seseorang menyerobot barang orang lain, kemudian rusak di tangannya, atau hilang, maka dalam keadaan ini wajiblah dibayar harganya

⁷ M. Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, h. 59-60.

dan diganti kerugian-kerugian si pemilik harta. Maka orang yang dirugikan berhak menerima *iwadl*. Demikian juga *diat*, dan *arsyul jinayat* termasuk pemilikan dengan jalan *khalafiyah*.

5. Para Ahli Waris Lebih Mempercayakan Pembagian Warisan di Pengadilan Agama

Ada terdapat banyak jenis sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, yang mana setiap jenis sengketa apapun selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian. Begitu pun juga dengan sengketa kewarisan, yang tak pernah lepas dari rana kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penyelesaian untuk sengketa-sengketa sangat dibutuhkan. Karena apapun jenis sengketa yang muncul menuntut penyelesaian yang bijaksana yang tidak merugikan kedua belah pihak. Maka di sinilah letak kedudukan lembaga Pengadilan Agama Sengkang dalam menangani sengketa kewarisan yang sudah menjadi kewenangan hukumnya, yakni berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dimana kewenangan hukumnya diatur pada Pasal 49 yang berbunyi “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) shadaqah dan (i) ekonomi syari’ah.”⁸

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Cemerlang, 2008), h. 16.

C. Upaya yang dilakukan Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam Menyelesaikan Perkara tentang Pembagian Warisan

Walaupun pada dasarnya setiap orang atau kelompok menghendaki hidup damai dan tenteram serta selalu berusaha menghindari munculnya sengketa atau konflik tersebut (kewarisan), namun kenyataannya menunjukkan ia terkadang muncul sengketa atau salah faham di antara mereka. Kesalahfahaman dimaksud ada yang dapat diselesaikan oleh mereka sendiri dan ada pula yang memerlukan campur tangan pihak lain serta memerlukan penyelesaian secara serius, bahkan ada pula yang menjadi hangat dan sengit jika kemudian tidak kunjung ditemukan cara yang tepat untuk menyelesaikannya.⁹

Berbicara tentang kewarisan tidak terlepas dari sistem penyelesaian sengketa yang digunakan, salah satunya yakni penyelesaian sengketa melalui jalur Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B. Yang mana lembaga tersebut dituntut agar mampu menjadi lembaga peradilan yang berintegritas dalam melayani masyarakat.

Adapun pertanyaan dan jawaban dari informan/narasumber tentang upaya yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam menyelesaikan sengketa pembagian warisan adalah menurut Drs. Idris, M.HI. bahwa “pertama-tama ditempuh upaya damai, bila upaya damai tidak berhasil maka perkara diproses sesuai urutan-urutan/tahapan pemeriksaan perkara. Upaya kedua sengaja menunda persidangan untuk memberikan kesempatan untuk berembuk, jadi disamping memberikan kesempatan pihak-pihak itu mempelajari apa yang dibuat

⁹ Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia* (Cet. II; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 2.

juga diharapkan. Majelis mengharapkan dengan penundaan sidang itu mereka bisa berpikir, kembali berpikir merenung bagaimana supaya mereka menyelesaikan secara damai. Pokoknya upaya damai sebelum jatuh putusan itu.”¹⁰ Sebagaimana yang dikatakan Drs. Idris, M.HI. selaku hakim Pengadilan Agama Sengkang melaksanakan upaya kedua yang apabila upaya pertama tidak berhasil dilaksanakan. Sedangkan menurut Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dalam upaya penyelesaian pembagian warisan mengatakan bahwa “kalau kita tetap merujuk ki kepada nash al-Qur’an 2:1 (dua banding satu), kalau laki-laki dengan perempuan.”¹¹ Hal ini menjelaskan bagaimana salah satu penyelesaian yang dilakukan apabila upaya mendamaikan kedua belah pihak gagal.

Pentingnya kehadiran tergugat dan penggugat sangat diperlukan dalam persidangan karena hal tersebut sangat mempengaruhi dalam hasil proses persidangan kedepannya bagi kedua belah pihak tersebut sebagaimana menurut Drs. H. Makka A. “kalau hadir tergugat dan penggugat maka dimediasi, tapi kalau tidak hadir kan tidak bisa dimediasikan. Perkara waris diselesaikan dengan cara apa yang telah ditetapkan pada fikih mawaris dan KHI.”¹² Upaya damai sendiri merupakan upaya pertama dilakukan dalam penyelesaian pembagian warisan sebagaimana yang dikatakan hakim Pengadilan Agama Sengkang Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H “pertama melalui perdamaian/mediasi, kalau tidak berhasil

¹⁰ Hasil wawancara dengan Drs. M. Idris, M.HI. Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 8 Juni 2017.

¹¹ Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Hasniati D., M.H. Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 8 Juni 2017.

¹² Hasil wawancara dengan Drs. H. Makka A. Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 8 Juni 2017.

baru diproses sesuai aturan yang berlaku.”¹³ Hal tersebut serupa dengan Dra. Narniati, S.H., M.H. yang mengatakan bahwa “dinasehati agar mereka bisa diselesaikan secara damai, dan jika para pihak hadir dalam persidangan maka sebelum dilanjutkan perkaranya harus diarahkan melalui mediasi.”¹⁴

Adapun menurut Drs. Muh. Arsyad, S.Ag. “upaya yang dilakukan sesuai dengan prosedur berperkara di Pengadilan.”¹⁵ Yakni melalui tahapan-tahapan dalam berperkara di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B. Terakhir menurut Dra. Hj. Farida Mustafa mengatakan bahwa “diberi pengertian/pemahaman atau diselesaikan sesuai pembagian masing-masing.”¹⁶ Pemberian suatu pemahaman jelas sangat diperlukan guna mengetahui bagaimana sebenarnya bagian yang mesti diterima oleh masing-masing ahli waris tanpa harus merusak suatu hubungan kekeluargaan karena kurangnya pemahaman tersebut.

Berdasarkan pernyataan dari narasumber diatas selaku hakim Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B tersebut, menunjukkan bahwa setiap narasumber melakukan mediasi atau mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu sebelum melangkah ke proses berikutnya. Hal tersebut sejalan dengan aturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Hakim,

¹³ Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Sengkang/Wakil Ketua Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 20 Juni 2017.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Dra. Narniati, S.H., M.H.. Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 20 Juni 2017.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Drs. Muh. Arsyad, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 20 Juni 2017.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Farida Mustafa Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 20 Juni 2017.

Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi”.

Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat’/49: 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya :

Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah (bagaikan) bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.¹⁷

Sebab diturunkannya ayat ini ialah dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Nabi Saw. pergi ke rumah Abdullah bin Ubay (munafiq) dengan mengendarai kedelai. Abdullah bin Ubay berkata: “Enyahlah engkau dariku! Demi Allah aku terganggu dengan bau busuk himarmu ini”. Berkatalah seorang Anshar: “Demi Allah, keledai Rasulullah lebih harum baunya daripada engkau”. Mendengar pertanyaan ini, marahlah anak buah Abdullah bin Ubay kepadanya. Sehingga timbullah kemarahan kedua belah pihak dan terjadilah perkelahian dengan menggunakan pelepah korma, tangan dan sandal.¹⁸ Berkenaan dengan peristiwa ini maka turunlah ayat 9 tentang perintah untuk menghentikan peperangan dan menciptakan perdamaian. Ayat 10 sendiri merupakan kelanjutan dari ayat 9 tersebut.

Adapun tafsir ayat diatas menjelaskan mengapa hal itu diperlukan. Itu perlu dilakukan dan islah perlu ditegakkan karena *sesungguhnya orang-orang*

¹⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Quran, 2002), h. 744.

¹⁸ A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Quran*, (Cet. 1; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 767.

mukmin yang mantap imannya serta dihimpun oleh keimanan, kendati tidak seketurunan *adalah bagaikan bersaudara* seketurunan, dengan demikian mereka memiliki keterikatan bersama dalam iman dan juga keterikatan bagaikan seketurunan; *karena itu* wahai orang-orang beriman yang tidak terlibat langsung dalam pertikaian antar kelompok-kelompok *damaikanlah* walau pertikaian itu hanya terjadi *antara kedua saudara kamu* apalagi jika jumlah yang bertikai lebih dari dua orang *dan bertakwalah kepada Allah* yakni jagalah diri kamu agar tidak ditimpa bencana, baik akibat pertikaian itu maupun selainnya *supaya kamu mendapat rahmat* antara lain rahmat persatuan dan kesatuan.¹⁹

Mediasi sangat diperlukan dalam hal ini, karena apabila mediasi yang dilakukan tidak berhasil, maka akan berdampak bagi keluarga yang bersengketa, terlebih masalah kewarisan tersebut.

D. Pandangan Hakim Terhadap Perbandingan Pembagian Harta Warisan Antara Fikih Mawaris Dengan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B

Negara Indonesia sebagai negara hukum, dikenal istilah hukum Islam yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum amali berupa interaksi sesama manusia. Karena itu pengembangan materi hukum dalam perkara Peradilan Agama adalah menyangkut hukum hukum Islam yang merupakan peraturan-peraturan yang bersumber dari wahyu dan diformulasikan ke dalam produk pemikiran hukum terutama undang-undang, khususnya yang menyangkut: (1) hukum perkawinan; (2) hukum kewarisan, wasiat dan hibah; (3)

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 13 (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 247.

hukum perwakafan dan *shadaqah*; (4) zakat; (infaq); dan (6) ekonomi syari'ah. Poin (1), (2), dan (3) merupakan materi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Sedangkan poin (4), (5), dan (6) merupakan materi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai hasil rekonstruksi materi undang-undang tersebut.²⁰

Perkembangan hukum Islam di Indonesia termasuk di dalamnya hukum perkara tertentu yang menjadi hukum positif bagi umat Islam, sekaligus merupakan hukum terapan bagi Peradilan Agama yang tidak menutup kemungkinannya untuk dimasukkan perkara pidana tertentu. Perkara pidana tertentu atau pidana khusus adalah awal dari perkara tertentu yang tidak menghasilkan kesepakatan para pencari keadilan, termasuk di dalamnya mengenai penyelesaian perkara hukum kewarisan Islam di Indonesia. Dasar hukum fikih mawaris jelas tersurat dalam QS. an-Nisa'/4: 7, 11, 12, dan 176. Sedangkan dasar hukum dari hukum kewarisan Islam adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dengan 44 pasal, terdapat dalam buku II pasal 171 sampai dengan pasal 214.²¹

Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam memiliki persamaan dan perbedaan tentang pembagian harta warisan. Namun peneliti lebih fokus pada perbandingan antara keduanya. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai perbandingan pembagian harta warisan antara Fikih Mawaris dengan Kompilasi

²⁰ Supardin, *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 14-15.

²¹ Supardin, *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*, (Cet. II; Makassar: Alauddin University Press, 2017), h. 2-3.

Hukum Islam di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B dapat dilihat dari hasil wawancara baik tertulis maupun lisan dengan informan/narasumber. Berikut ini adalah pertanyaan dan jawaban dari informan/narasumber tentang pandangan hakim terhadap perbandingan pembagian harta warisan antara Fikih Mawaris dengan Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Wajo (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B) :

1. Pertanyaan: Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai perbandingan pembagian harta warisan antara Fikih Mawaris dengan Kompilasi Hukum Islam?
2. Jawaban : Hasil wawancara dengan informan/narasumber baik yang tertulis maupun lisan mengenai pandangan hakim terhadap perbandingan pembagian harta warisan antara Fikih Mawaris dengan Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Wajo (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B). Adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Informan 1 (Drs. Idris, M.HI.)²²
Saling melengkapi karena dalam hal tertentu ada yang diatur dalam KHI tapi tidak ada dalam fikih waris. Bahwa hal-hal yang tidak diatur spesifik di sini ya tetap kembali ke fikih mawaris, jadi bukan berarti bertentangan, bukan berarti ini kurang karena tidak diatur. Dalam hal-hal tertentu menurut pertimbangan majelis fikih waris yang dipakai, kalau dicari dasarnya tidak ada disini (KHI), di fikih mawaris diambil, bukan berarti ini tidak dipakai. Jadi kalau kita mau lihat sisi perbandingannya saling melengkapi, sebab ada juga tidak diatur di

²² Hasil wawancara dengan Drs. M. Idris Gani, M.HI. Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 8 Juni 2017.

fikih mawaris diatur disini (KHI) yang tidak terakomodir di fikih mawaris ada di sini (KHI), yang tidak ada disini memang sengaja tidak dibahas karna sudah ada di fikih mawaris.

b. Informan 2 (Dra. Hj. Hasniati D., M.H.)

Saya merasa tidak ada perbandingan antara keduanya karena baik KHI maupun fikih mawaris sama sumber rujukannya yakni al-Qur'an dan Hadis.²³

c. Informan 3 (Drs. H. Makka A.)

Antara fikih mawaris dengan KHI tidak ada perbedaan karena baik fikih mawaris maupun KHI dasarnya adalah al-Qur'an dan Hadis.²⁴

d. Informan 4 (Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H)

Kompilasi Hukum Islam juga mengacu kepada fikih mawaris hanya secara jelas disebutkan mengenai ahli waris pengganti.²⁵

e. Informan 5 (Dra. Hj. Faridah Mustafa)

Perbandingannya baik fikih mawaris maupun Kompilasi Hukum Islam saling melengkapi, karena ada yang diatur di KHI tapi tidak diatur pada fikih mawaris begitupun sebaliknya.²⁶

f. Informan 6 (Drs. Muh. Arsyad, S.Ag.)

Saling melengkapi, bahkan KHI itu adalah fiqhi ala Indonesia dalam perkembangan hukum di Indonesia.²⁷

²³ Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Hasniati D., M.H. Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 8 Juni 2017.

²⁴ Hasil wawancara dengan Drs. H. Makka A. Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 8 Juni 2017.

²⁵ Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Sengkang/Wakil Ketua Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 20 Juni 2017.

²⁶ Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Farida Mustafa Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 20 Juni 2017.

g. Informan 7 (Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.)

Dalam fikih mawaris itu yang konvensional yang tidak dikenal ahli waris pengganti. Tapi kalau sudah kompilasi itu sudah ada perbedaan karena di KHI itu muncullah ahli waris pengganti, itu munculnya karena kita mencari keadilan. Dalam hukum mawaris/hukum Islam itu tetap ada keadilannya tetapi lebih dicari oleh kompilasi itu. Gono-gini, ahli waris pengganti termasuk itu yang nambah, jadi sebenarnya tidaklah merubah pembagian. Kompilasi tidak merubah yang ada pada hukum Islam hanya menambah, kemudian bagian ayah itukan tidak berubah hanya saja *ashabah*-nya yang dihilangkan, tapi sampai sekarang tidak ada alasannya kenapa kompilasi mengghilangkan itu. Sebenarnya semua yang tidak jelas pembagiannya di dalam kompilasi kembali ke hukum Islam.²⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara baik tertulis maupun lisan dengan 7 (tujuh) informan/narasumber tersebut yang merupakan hakim Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B memiliki pandangan yang berbeda tentang perbedaan yang terjadi antara fikih mawaris dengan Kompilasi Hukum Islam. Dari 5 (lima) diantara 7 (tujuh) hakim tersebut bahwa benar terjadi perbandingan antara fikih mawaris dengan Kompilasi Hukum Islam, atas dasar itulah sehingga mereka saling melengkapi antara keduanya. Karena apabila tidak ditemukan aturannya pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka akan kembali merujuk ke fikih mawaris. Sedangkan hakim yang menyatakan tidak ada perbandingan atau

²⁷ Hasil wawancara dengan Drs. Muh. Arsyad, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 20 Juni 2017.

²⁸ Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. Hakim Pengadilan Agama Sengkang/Ketua Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 21 Juni 2017.

perbedaan antara keduanya hanya 2 (dua) dengan alasan baik fikih mawaris maupun Kompilasi Hukum Islam sumber rujukannya al-Qur'an dan Hadis. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perbandingan pembagian harta warisan antara fikih mawaris dengan Kompilasi Hukum Islam ialah dalam penggunaannya hakim lebih mengutamakan Kompilasi Hukum Islam terlebih dahulu dalam proses pembagian harta warisan sebelum kembali ke fikih mawaris, yang apabila tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam kembali ke fikih mawaris, karena adanya perbedaan antara keduanya sehingga saling melengkapi.

Adapun tabel yang peneliti buat untuk memperjelas perbandingannya antara lain sebagai berikut:

NO	PERBANDINGAN	
	FIKIH MAWARIS	KOMPILASI HUKUM ISLAM
1	2	3
1	<p>Ayah mendapat bagian:</p> <p>(a) 1/6: Jika ia berbarengan dengan <i>fur' al-waris laki-laki</i> yakni anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah.</p> <p>(b) 1/6+ a : Jika berbarengan dengan <i>far'u</i> waris perempuan yakni anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah.</p> <p>(c) <i>Ashabah</i>: Jika ia tidak berbarengan dengan <i>far' al-waris</i> sama sekali. Sekalipun ada keturunan, namun mereka tidak berhak waris (<i>far'u ghaier waris</i>) seperti cucu perempuan dari pancar perempuan atau cucu laki-laki dari pancar perempuan.</p>	<p>Ayah mendapat bagian:</p> <p>(a) 1/3: Bila pewaris tidak meninggalkan anak.</p> <p>(b) 1/6: Bila pewaris meninggalkan anak.</p> <p>Hal tersebut diatur dalam KHI, pasal 177 .</p>

2	<p>Kakek mendapat bagian:</p> <p>(a) 1/6: Jika ia berbarengan dengan <i>fur' al-warīs laki-laki</i> yakni anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah.</p> <p>(b) 1/6+'a: Jika berbarengan dengan <i>far'u</i> waris perempuan yakni anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah.</p> <p>(c) <i>Ashabah</i>: Jika ia tidak berbarengan dengan <i>far' al-warīs</i> sama sekali. Sekalipun ada keturunan namun mereka tidak berhak waris (<i>far'u ghaier waris</i>) seperti cucu perempuan dari pancar perempuan atau cucu laki-laki dari pancar perempuan.</p>	Tidak ada pasal yang mengatur bagian Kakek dalam KHI
3	Nenek mendapat bagian 1/6 apabila tidak berbarengan dengan Ibu	Tidak ada pasal yang mengatur bagian Nenek dalam KHI
4	Cucu laki pancar laki-laki mendapat bagian <i>ashabah bi nafsih</i> apabila anak laki-laki ataupun anak perempuan tidak ada, maka ia atau cucu perempuan sebagai penggantinya.	Cucu laki pancar laki-laki tidak termasuk dalam kelompok ahli waris sebagaimana yang diatur dalam KHI, pasal 174.
5	<p>Cucu perempuan pancar laki mendapat bagian:</p> <p>(a) 1/2: Seorang diri. Tidak berbarengan dengan anak perempuan atau orang laki-laki atau <i>mu'ashshib-nya</i>.</p> <p>(b) 2/3: Dua orang atau lebih; tidak berbarengan dengan anak perempuan kandung atau <i>mu'ashshib-nya</i>.</p> <p>(c) 'Abg: Bersama dengan <i>mu'ashshib-nya</i> yang sederajat atau lebih rendah, bila ia diperlukannya.</p> <p>(d) 1/6 (penyempurna 2/3): Bila bersama-sama dengan seorang anak perempuan.</p>	Cucu perempuan pancar laki-laki tidak termasuk dalam kelompok ahli waris sebagaimana yang diatur dalam KHI, pasal 174.
6	Tidak mengatur tentang adanya ahli waris pengganti	Adanya Ahli waris pengganti, sebagaimana diatur dalam KHI, pasal 185.
7	Tidak mengenal masalah gono-gini	Adanya masalah gono-gini.
8	<p>Mengatur penyelesaian pembagian warisan yang bersifat khusus, antara lain:</p> <p>(a) <i>Gharrawain-Umaryatain</i>;</p> <p>(b) <i>Musyarakah</i>;</p> <p>(c) Kakek Bersama Saudara</p>	Tidak ada pasal mengatur penyelesaian masalah pembagian warisan yang bersifat khusus.

Dalam al-Qur'an sendiri telah mengatur tentang bagian yang berhak diterima oleh masing-masing ahli warisnya, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيحَتَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Ayat ke-33 ini diturunkan sehubungan dengan suatu peristiwa yang berhubungan dengan Dawud bin Hushain yang pada suatu ketika membaca ayat ke-33, yaitu yang berbunyi: *Walladziina 'aqadat aimaanukum... = Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka...-sampai akhir ayat, kepada Ummi Sa'ad bin Rabi' yang tinggal di rumah Abu Bakar. Ketika itu Ummi Sa'ad bin Rabi' berkata: "Bacaanmu itu adalah salah. Yang betul adalah Walladziina 'aqadat aimaanukum. Sebab ayat ini diturunkan sehubungan dengan Abu Bakar yang berjanji tidak akan memberi harta warisan-sepeninggalnya- kepada anaknya, karena dia tidak memeluk agama Islam. Setelah anak itu memeluk Islam, maka diperintahkan kepada Abu Bakar agar memberinya harta warisan sepeninggalnya nanti, yaitu dengan diturunkannya ayat ini".*²⁹

²⁹ A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Quran*, (Cet. 1; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 221-222.

Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengambil putusan dalam perkara kewarisan, maka peneliti memberikan salah satu hasil putusan Hakim Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B mengenai kasus perkara kewarisan menyangkut masalah gono-gini (harta bersama), yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan Nomor Perkara: 661/Pdt.G/2016/PA.Skg adalah sebagai berikut:

**Putusan Nomor: 661/Pdt.G/2016/PA.Skg (Dalam Perkara Kewarisan antara
Zulkifli Bin H. Syamsu lawan Hj. Sahri Bunga Binti Syarifuddin)**

TENTANG DUDUK PERKARANYA SEBAGAI BERIKUT:

2. Bahwa almarhum H. Syamsu Bin Makkarateng (ayah Penggugat) meninggal dunia pada tanggal 23-09-2015 semasa hidupnya menikah sebanyak dua kali, yaitu dengan isteri pertamanya yang bernama Almarhumah Hj. Dahlia Binti H. Pabbo yang dinikahi pada tahun 1988 (ibu kandung Penggugat) dari pernikahannya dengan isteri pertamanya ia dikaruniai seorang anak bernama Zulkifli Bin H. Syamsu (Penggugat). Adapun isteri pertama almarhum H. Syamsu Bin Makkarateng meninggal dunia pada tahun 1990.
3. Bahwa setelah isteri pertamanya meninggal dunia Almarhum H. Syamsu Bin Makkarateng menikah lagi dengan isteri keduanya yaitu Hj. Sahri Bunga Binti Syarifuddin (Tergugat) yang dinikahi pada tanggal 21-2-1997 dan dari isteri keduanya tersebut Almarhum H. Syamsu Bin Makkarateng tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa Almarhum H. Syamsu Bin Makkarateng yang meninggal dunia pada tanggal 23-09-2015 meninggalkan dua orang ahli waris yaitu isteri keduanya

yang bernama Hj. Sahri Bunga Binti Syarifuddin (Tergugat) dan seorang anak dari isteri pertamanya yang bernama Zulkifli Bin H. Syamsu (Penggugat)

5. Bahwa Almarhum H. Syamsu Bin Makkarateng selain meninggalkan para ahli waris juga meninggalkan harta warisan (budel waris) yang merupakan harta bersama dengan isteri keduanya, yang keseluruhannya belum terbagi kepada para ahli warisnya yang berhak sampai saat sekarang ini.
6. Bahwa adapun harta warisan (budel waris) peninggalan Almarhum H. Syamsu Bin Makkarateng yang merupakan harta bersama dengan dengan isteri keduanya, yang belum terbagi kepada para ahli warisnya sesuai haknya masing-masing berdasarkan peraturan hukum yang berlaku yaitu sebagai berikut:

Obyek Sengketa Point 1:

Tanah perumahan seluas $\pm 327 \text{ M}^2$ terdaftar dalam SPPT No. 73. 13. 020. 005. 022 -0031. 0 atas nama Hj. Sahri Bunga beserta rumah permanen 2 petak berlantai 2 yang ada di atasnya, terletak di Jalan Bau Munawarah No. 88 Sengkang. Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah H. Nasruddin.
- Sebelah Timur : Obyek Sengketa Poin 2.
- Sebelah Selatan : Jalan Bau Munawarah.
- Sebelah Barat : Rumah H. Kambe.

Obyek Sengketa Point 2:

Tanah perumahan seluas $\pm 90 \text{ M}^2$ terdaftar dalam SPPT No. 73. 13. 020. 005. 022 -0030. 0 atas nama Hj. Sahri Bunga beserta rumah permanen 1 petak berlantai 2 yang ada di atasnya, terletak di Jalan Bau Munawarah Sengkang. Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Abdul Kadir.
- Sebelah Timur : Tanah H. Abdul Kadir.
- Sebelah Selatan : Jalan Bau Munawarah.

- *Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 1.*

Obyek Sengketa Point 3:

Tanah perumahan seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ terdaftar dalam SPPT No. 73. 13. 020. 005. 022 -0129. 0 atas nama Hj. Sahri Bunga beserta rumah permanen 1 petak berlantai 2 yang ada diatasnya, terletak di Jalan Jalantek Sengkang. Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah Utara : Jalan Jalantek.*
- *Sebelah Timur : Rumah H. Nasruddin.*
- *Sebelah Selatan : Tanah H. A. Abdul Rahman Toppo*
- *Sebelah Barat : Saluran Air/Selokan*

Obyek Sengketa Point 4:

1 (Satu) unit mobil Toyota Innova Hitam dengan Nomor Polisi:

- *Lama : DD 952 BQ.*
- *Baru : DD 1482 QD atas nama pemilik H. Syamsu.*

Obyek Sengketa Point 5:

Piutang berupa barang (sarung sutera) senilai $\pm \text{Rp. } 200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah) yang belum diterima dari H. Muh. Saleh (Toko Aneka Sutera) Jln. G. Lompo Battang Makassar.

7. Bahwa keseluruhan budel waris yang menjadi obyek sengketa didalam perkara ini dikuasai oleh tergugat dimana penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan karenanya penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan.
8. Bahwa untuk menghindari jangan sampai tergugat mengalihkan seluruh obyek sengketa kepada orang lain/pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak. Sehingga patut dan berdasar hukum Pengadilan Agama Sengkang meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini
9. Bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama tergugat didalam penguasaannya terhadap keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini, maka

berdasar hukum pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

10. Bahwa oleh karena gugatan penggugat dalam perkara ini didukung dengan alat bukti yang kuat menurut hukum dan untuk mencegah berlarut-larutnya tergugat menguasai obyek sengketa. Sehingga patut dan berdasar hukum jika putusan pada perkara ini dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut. Maka penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat sepenuhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Almarhun H. Syamsu Bin Makkarateng meninggal dunia pada tanggal 23-09-2015 dan menetapkan Penggugat dan Tergugat adalah para ahli waris dari Almarhun H. Syamsu Bin Makkarateng.
3. Menetapkan secara hukum obyek sengketa point 1 sampai dengan obyek sengketa point 5 adalah harta warisan Almarhun H. Syamsu Bin Makkarateng berupa harta bersama dengan isteri keduanya (Tergugat) yang belum terbagi di antara para ahli warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat.
4. Menetapkan bahwa harta warisan obyek sengketa point 1 sampai dengan obyek sengketa point 5 harus beralih dan dibagi waris kepada para ahli

waris Almarhun H. Syamsu Bin Makkarateng yaitu Penggugat dan Tergugat.

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa point 1 sampai dengan obyek sengketa point 5 kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya untuk seterusnya dibagi waris antara para ahli waris Almarhun H. Syamsu Bin Makkarateng yaitu Penggugat dan Tergugat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dibagikan secara natural dan jika tidak bisa dibagi secara natural, maka obyek sengketa dijual lelang dan seterusnya harga jual lelang dibagikan kepada para ahli waris Almarhun H. Syamsu Bin Makkarateng yaitu Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sengkang atas obyek sengketa dalam perkara ini.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
8. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan verzet, banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

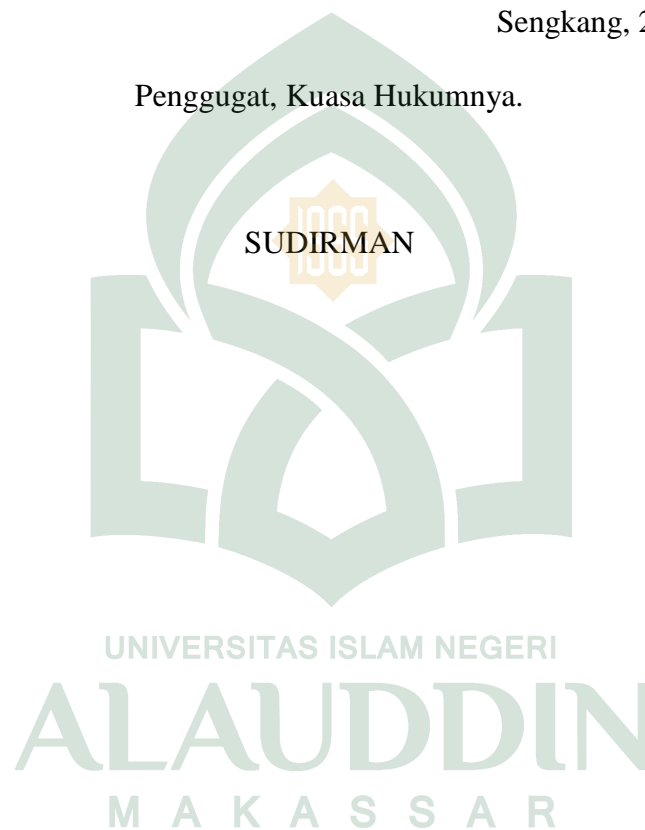
DAN/ATAU:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Terima Kasih

Sengkang, 2 Agustus 2016.

Penggugat, Kuasa Hukumnya.



**BERITA ACARA SIDANG
Nomor 0661/Pdt.G/2016/PA.Skg**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara kewarisan pada tingkat pertama, yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 dalam perkara yang diajukan oleh:

Zulkifli bin H. Syamsu, sebagai **Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi**

Melawan

Hj. Sahri Bunga binti Syarifuddin sebagai **Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi**

Susunan majelis yang bersidang :

1. Hj. St. Aisyah S,SH sebagai Ketua Majelis;
2. Drs. Idris, M.HI. sebagai Hakim Anggota;
3. Dra Hj. Narniati, S.H., N.H. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
Dra. Wahda sebagai Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap dalam persidangan

Tergugat Materiil dan kuasa hukumnya datang menghadap dalam persidangan

Kemudian Ketua Majelis menjelaskan kepada kuasa hukum Penggugat oleh karena ada perubahan susunan Majelis Hakim berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama Sengkang W.20-A3/44/Kp.00.3/SK/II/2017, tanggal 1 Pebruari 2017 sebagaimana tersebut diatas.

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan hasil musyawarah Majelis Hakim yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan H. Syamsu bin Makkarateng meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 September 2015;
3. Menetapkan ahli waris H. Syamsu bin Makkarateng sebagai berikut:
 - Hj. Sahri Bunga binti Syarifuddin (istri)
 - Zulkifli bin H. Syamsu (anak)
4. Menetapkan harta bersama almarhum H. Syamsu bin Makkarateng dengan istrinya Hj. Sahri Bunga binti Syarifuddin sebagai berikut:
 - 4.1. Tanah perumahan seluas 227 M², beserta rumah permanen 2 petak berlantai 2 yang ada diatasnya, yang terletak di Jalan Bau Munawarah. Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : rumah H. Nasruddin.
 - Sebelah Timur : obyek sengketa poin 2.
 - Sebelah Selatan : Jalan Bau Munawarah.
 - Sebelah Barat : rumah H. Kambe.
 - 4.2. Rumah batu permanen 1 petak berlantai 2 yang ada diatas tanah Perumahan milik Hj. Sahri Bunga binti Syarifuddin seluas 90 M², yang terletak di Jalan Bau Munawarah. Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah H. Abdul Kadir.
 - Sebelah Timur : tanah H. Abdul Kadir.
 - Sebelah Selatan : Jalan Bau Munawarah.
 - Sebelah Barat : obyek sengketa poin 1.
 - 4.3. Tanah kapling seluas 300 M² yang terletak di Jalan Jalantek Sengkang. Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Jalantek.
 - Sebelah Timur : rumah H. Nasruddin.
 - Sebelah Selatan : tanah H. A. Abdul Rahman Toppo
 - Sebelah Barat : saluran air (selokan)
 - 4.4. 1 Unit mobil Toyota Inova hitam Nomor Polisi DD 1482 QD

5. Menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama tersebut adalah 1/2 (seperdua) bagian untuk almarhum H. Syamsu bin Makkarateng dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Hj. Sahri Bunga binti Syarifuddin.
6. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta tersebut pada point 4 di atas merupakan harta peninggalan almarhum H. Syamsu bin Makkarateng akan dibagikan kepada ahli waris dan bagiannya masing-masing sebagai berikut:
 - Hj. Sahri Bunga binti Syarifuddin (istri) mendapat 1/8 bagian.
 - Zulkifli bin H. Syamsu (anak) mendapat sisa yaitu 7/8 bagian.
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan harta warisan yang ada dalam penguasaannya kepada ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka harta tersebut dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris yang berhak.
8. Menolak gugatan penggugat selebihnya.

Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian
2. Menetapkan H. Syamsu bin Makkarateng meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 September 2015
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Syamsu bin Makkarateng sebagai berikut:
 - Hj. Sahri Bunga binti Syarifuddin (istri).
 - Zulkifli bin H. Syamsu (anak).
4. Menetapkan harta bersama almarhum H. Syamsu bin Makkarateng dengan istrinya Hj. Sahri Bunga sebagai berikut:
 - 4.1. Berupa alat tulis Kantor senilai Rp. 33.450.133 (Tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) penguasaan Tergugat.
5. Menetapkan bagian masing-masing harta bersama tersebut adalah 1/2 (seperdua) bagian untuk almarhum H. Syamsu bin Makkarateng dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Hj. Sahri Bunga binti Syarifuddin.

6. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta tersebut pada point 4 di atas merupakan harta peninggalan almarhum H. Syamsu bin Makkarateng akan dibagikan kepada ahli waris dan bagiannya masing-masing sebagai berikut:
 - Hj. Sahri Bunga binti Syarifuddin (istri) mendapat 1/8 bagian.
 - Zulkifli bin H. Syamsu (anak) mendapat sisa yaitu 7/8 bagian.
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan harta warisan yang ada dalam penguasaannya kepada ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka harta tersebut dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris yang berhak.
8. Menolak gugatan penggugat selebihnya.

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Setelah pembacaan putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Dra. Wahda

Hj. St. Aisyah S.,S.H

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelusuran serta penjabaran dalam skripsi ini, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggugat mengajukan gugatan mereka di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B karena disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, sebagai berikut: 1) Hak Penggugat Diambil Ahli Waris Yang Lain; 2) Terjadi Perbedaan Persepsi Antara Sesama Ahli Waris; 3) Adanya Ahli Waris Yang Mengambil Bagian Lebih Dari Yang Lain; 4) Pihak Yang Memiliki/Menguasai Objek Tidak Mau Membagi Secara Sukarela Dengan Pihak-Pihak Yang Lain; 5) Para Ahli Waris Lebih Mempercayakan Pembagian Warisan di Pengadilan Agama.
2. Upaya yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam menyelesaikan perkara tentang pembagian warisan adalah melakukan mediasi atau mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu sebelum melangkah ke proses berikutnya. Hal tersebut sejalan dengan aturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi”.
3. Perbandingan pembagian harta warisan antara fikih mawaris dengan Kompilasi Hukum Islam ialah terjadi perbedaan sehingga harus saling

melengkapi, namun dalam penggunaannya hakim lebih mengutamakan Kompilasi Hukum Islam terlebih dahulu dalam proses pembagian harta warisan sebelum kembali ke fikih mawaris.

B. *Implikasi Penelitian*

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu untuk lebih meningkatkan integritas hakim dalam pengambilan putusan mengenai perkara kewarisan secara adil.
2. Untuk memberikan pengetahuan dan masukan kepada masyarakat umum, mahasiswa/(i) dalam bidang hukum Islam serta perangkat peradilan baik itu hakim, panitera, maupun pengacara pada lingkup peradilan agama dalam memahami perbandingan pembagian harta warisan yang terjadi antara fikih mawaris dengan Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur-an.

Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

-----, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Anwar, Desy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia, 2003.

Athoillah, M., *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*. Bandung: Yrama Widya, 2016.

A. Karim, Muchith, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadis)*. Bandung: Cordoba International-Indonesia, 2016.

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002.

Ghofur Anshori, Abdul, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Imani, Allamah Kamal Faqih dan tim ulama, *Tafsir Nurul Quran: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Quran (jilid 3)*, Cet. I; Jakarta: Al-Huda, 2003.

Kadir, A., *Memahami Ilmu Faraidh (Tanya Jawab Hukum Waris Islam)*. Jakarta: Amzah, 2016.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2002.

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

Manaf, Abdul, *Putusan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perceraian Dan Kewarisan*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2013.

Marbun, Rocky dkk., *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta: Visimedia, 2012.

Mahali, A. Mudjab, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Quran*, Cet. 1; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002

Mustari, Abdillah, *Hukum Waris (Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata Barat)*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.

Muthiah, Aulia dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam: Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

M. Bakry, Muammar, *Akuntansi Dasar Mawaris (Cara Cepat Membagi Harta Pusaka secara Syar'i)*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Cemerlang, t.th.

- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Grahamedia press, 2014.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Cemerlang, 2008.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Saleh Ridwan, Muhammad, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Samin, Sabri dan Andi Nurmaya Aroeng, *Buku Daras Fikih II*. Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 13, Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2004
- Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Supardin, *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*, Cet. II; Makassar: Alauddin University Press, 2017
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Tihami, M.A. dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian)*. Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Zaidah Yusna, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia*. Cet. II; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

L

A

M

P

I

R

A

N

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. HM. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 424835 Fax.
424836

Nomor : SI.1/PP.00.9/1959/2017

Samata, 29 Mei 2017

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Kepada Yth

**Ketua Pengadilan Agama Sengkang
Di**

Sengkang

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama	: Andi Wahyudi
Nim	: 10100113072
Fakultas/jurusan	: Syaria'ah dan Hukum / Peradilan
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Jl. Manuruki 2 No. 47

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERBANDINGAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANTARA FIKIH MAWARIS DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KABUPATEN WAJO (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B)".

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Supardin, M.H.I.

2. Drs. H. Syamsuddin Ranja, M.H.I.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di kantor Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B. terhitung mulai tanggal 5 Juni 2017 s/d 5 Juli 2017.

Demikian harapan kami dan terima kasih.

Wassalam
Am. Rektor
Dekan

Prof. Dr. Darussalam., M.Ag
NIP. 19621016199031003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar Di Samata Gowa.



PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Jl. Akasia Sengkang Telp. (0485) 21891 /Fax. (0485) 21848

e-mail : pasengkang@yahoo.co.id

Kabupaten Wajo 90911

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W.20-A3/ 982 /TL.00/VI/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H, Ketua Pengadilan Agama Sengkang menerangkan bahwa:

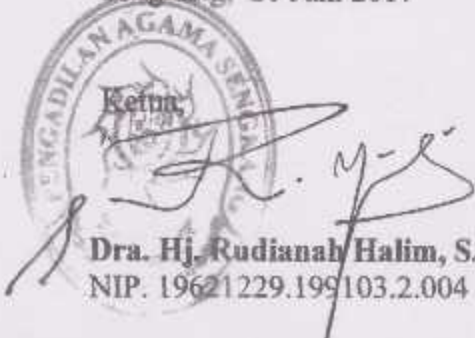
Nama : **ANDI WAHYUDI**
NIM : 10100113072
Program Studi : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan
Jurusan : Peradilan
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Benar yang bersangkutan telah mengadakan penelitian pada Kantor Pengadilan Agama Sengkang, dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERBANDINGAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANTARA FIKIH MAWARIS DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KABUPATEN WAJO (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang Kelas IB)**".

Setelah penulisan skripsi tersebut selesai, diharapkan kepada yang bersangkutan untuk menyeter 1 exemplar ke Perpustakaan Pengadilan Agama Sengkang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 20 Juni 2017


Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.
NIP. 19621229.199103.2.004

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Idris, M.HI.
Pekerjaan/Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Sengkang
Alamat : Jln. S. Hasanuddin

Benar telah memberikan keterangan kepada:

Nama : Andi Wahyudi
NIM : 10100113072
Jurusan/Prodi : Peradilan/Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan
Alamat : Jl. Manuruki 2 No. 47

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan wawancara berkaitan dengan judul skripsi "PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERBANDINGAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANTARA FIKIH MAWARIS DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KABUPATEN WAJO (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B)".

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Sengkang, 8 Juni 2017



Drs. Idris, M.HI.

NIP: 19581231 198503 1 051

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. Hasniati D., M.H

Pekerjaan/Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Sengkang

Alamat : Jln. Beringin, Lr. Akasia

Benar telah memberikan keterangan kepada:

Nama : Andi Wahyudi

NIM : 10100113072

Jurusan/Prodi : Peradilan/Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

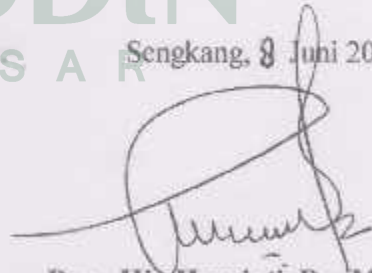
Alamat : Jl. Manuruki 2 No. 47

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan wawancara berkaitan dengan judul skripsi "PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERBANDINGAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANTARA FIKIH MAWARIS DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KABUPATEN WAJO (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B)".

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALA UDDIN
MAKASSAR

Sengkang, 8 Juni 2017



Dra. Hj. Hasniati D., M.H

NIP: 19650815 199203 2 001

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Makka A.

Pekerjaan/Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Sengkang

Alamat : Jln. S. Hasanuddin, (MES Pengadilan Agama Sengkang)

Benar telah memberikan keterangan kepada:

Nama : Andi Wahyudi

NIM : 10100113072

Jurusan/Prodi : Peradilan/Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Alamat : Jl. Manuruki 2 No. 47

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan wawancara berkaitan dengan judul skripsi "PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERBANDINGAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANTARA FIKIH MAWARIS DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KABUPATEN WAJO (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B)".

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 8 Juni 2017


Drs. H. Makka A.

NIP: 19610212 199103 1 005

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Muh. Arsyad, S.Ag.

Pekerjaan/Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Sengkang

Alamat : Jln. S. Hasanuddin. (MES Pengadilan Agama Sengkang)

Benar telah memberikan keterangan kepada:

Nama : Andi Wahyudi

NIM : 10100113072

Jurusan/Prodi : Peradilan/Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Alamat : Jl. Manuruki 2 No. 47

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan wawancara berkaitan dengan judul skripsi "PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERBANDINGAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANTARA FIKIH MAWARIS DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KABUPATEN WAJO (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B)".

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Sengkang, 20 Juni 2017



Drs. Muh. Arsyad, S.Ag.

NIP: 19541231 198103 1 094

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. Farida Mustafa

Pekerjaan/Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Sengkang

Alamat : Jln. Beringin

Benar telah memberikan keterangan kepada:

Nama : Andi Wahyudi

NIM : 10100113072

Jurusan/Prodi : Peradilan/Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

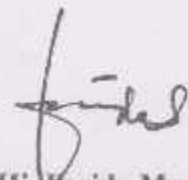
Alamat : Jl. Manuruki 2 No. 47

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan wawancara berkaitan dengan judul skripsi "PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERBANDINGAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANTARA FIKIH MAWARIS DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KABUPATEN WAJO (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B)".

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALA UDDIN
MAKASSAR

Sengkang, 20 Juni 2017



Dra. Hj. Farida Mustafa

NIP: 19541231 198303 2 014

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Narniati, S.H., M.H.

Pekerjaan/Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Sengkang

Alamat : Jln. Beringin, Lr. Akasia

Benar telah memberikan keterangan kepada:

Nama : Andi Wahyudi

NIM : 10100113072

Jurusan/Prodi : Peradilan/Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Alamat : Jl. Manuruki 2 No. 47

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan wawancara berkaitan dengan judul skripsi "PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERBANDINGAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANTARA FIKIH MAWARIS DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KABUPATEN WAJO (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B)".

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 20 Juni 2017



Dra. Narniati, S.H., M.H.

NIP: 19621211 198903 2 004

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H.

Pekerjaan/Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Sengkang / Wakil Ketua PA. Sengkang

Alamat : Jln. Beringin, Lr. Akana

Benar telah memberikan keterangan kepada:

Nama : Andi Wahyudi

NIM : 10100113072

Jurusan/Prodi : Peradilan/Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Alamat : Jl. Manuruki 2 No. 47

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan wawancara berkaitan dengan judul skripsi "PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERBANDINGAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANTARA FIKIH MAWARIS DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KABUPATEN WAJO (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B)".

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Sengkang, 10 Juni 2017



Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H.

NIP: 19671231 199303 1 018

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Pekerjaan/Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Sengkang / Ketua Pengadilan Agama Sengkang

Alamat : Jln. Beringin

Benar telah memberikan keterangan kepada:

Nama : Andi Wahyudi

NIM : 10100113072

Jurusan/Prodi : Peradilan/Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Alamat : Jl. Manuruki 2 No. 47

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan wawancara berkaitan dengan judul skripsi "PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERBANDINGAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANTARA FIKIH MAWARIS DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KABUPATEN WAJO (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B)".

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Sengkang, 21 Juni 2017



Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

NIP: 19621229 199103 2 004

FOTO-FOTO PENELITIAN



Gambar 1.1. Kantor Pengadilan Agama Sengkang (Lokasi Penelitian)



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B





Gambar 1.6. Wawancara Human Informan Drs. Idris, M.H.I.



Gambar 1.7. Wawancara Human Informan Dra. Hj. Hasniati D., M.H.



Gambar 1.8. Wawancara Human Informan Drs. H. Makka A.



Gambar 1.9. Wawancara Human Informan Drs. Muh. Arsyad, S.Ag.

M A K A S S A R



Gambar 1.10. Wawancara Human Informan Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.



Gambar 1.11. Wawancara Human Informan Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.



Gambar 1.12. Human Informan lainnya yang diwawancarai Dra. Narniati, S.H., M.H dan Dra. Hj. Farida Mustafa

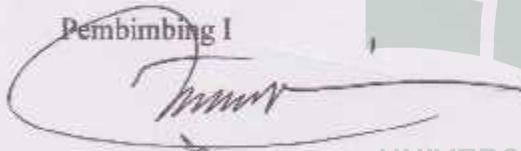
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERBANDINGAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANTARA FIKIH MAWARIS DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KABUPATEN WAJO (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1 B)", yang disusun oleh Andi Wahyudi, NIM: 10100113072, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diteliti dan dikoreksi secara saksama serta disetujui untuk diseminarkan (seminar proposal).

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 12 Mei 2017 M
15 Sya'ban 1438 H

Pembimbing I



Dr. H. Supardin, M.H.I.
NIP. 196503021994031003

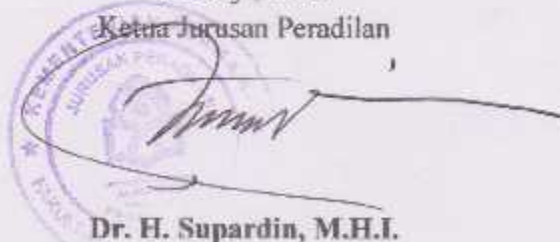
Pembimbing II



Drs. H. Syamsuddin R., M.H.I.
NIP. 195612311987011003

Disetujui oleh:

Ketua Jurusan Peradilan



Dr. H. Supardin, M.H.I.
NIP. 196503021994031003

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal skripsi yang berjudul "PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERBANDINGAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANTARA FIKIH MAWARIS DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KABUPATEN WAJO (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B)" yang disusun oleh Andi Wahyudi, NIM: 10100113072, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam seminar proposal skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 M, bertepatan dengan 19 Sya'ban 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian (dengan beberapa perbaikan).


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 22 Mei 2017 M
25 Sya'ban 1438 H

Pembimbing I


Dr. H. Supardin, M.H.I.
NIP. 196503021994031003

Pembimbing II


Drs. H. Syamsuddin R., M.H.I.
NIP. 195612311987011003

Disahkan oleh:
Ketua Jurusan Peradilan


Dr. H. Supardin, M.H.I.
NIP. 196503021994031003

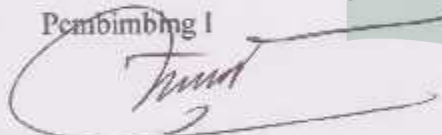
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERBANDINGAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANTARA FIKIH MAWARIS DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KABUPATEN WAJO (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B)", yang disusun oleh Andi Wahyudi, NIM: 10100113072, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah melaksanakan penelitian, diteliti, dan dikoreksi secara saksama serta disetujui untuk diseminarkan (seminar hasil).

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 24 Juli 2017 M
30 Syawwal 1438 H

Pembimbing I



Dr. H. Supardin, M.H.I.
NIP. 196503021994031003

Pembimbing II

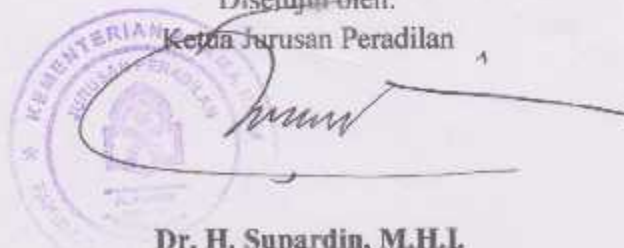


Drs. H. Syamsuddin R., M.H.I.
NIP. 195612311987011003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Disetujui oleh:

Ketua Jurusan Peradilan



Dr. H. Supardin, M.H.I.
NIP. 196503021994031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING/PENGUJI

Skripsi yang berjudul "PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERBANDINGAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANTARA FIKIH MAWARIS DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KABUPATEN WAJO (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B)" yang disusun oleh Andi Wahyudi, NIM: 10100113072, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang seminar hasil yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017 M, bertepatan dengan tanggal 03 Zulkaidah 1438 H, dinyatakan telah diperiksa secara saksama, diteliti, dan disetujui untuk dimunāqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 31 Juli 2017 M
07 Zulkaidah 1438 H

Penguji I	: Dr. Abdillah Mustari, M. Ag.	(.....)
Penguji II	: Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M. Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Supardin, M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Drs. H. Syamsuddin R., M.H.I.	(.....)



Disetujui oleh:
Ketua Jurusan Peradilan

Dr. H. Supardin, M.H.I.
NIP. 196503021994031003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul, **“PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERBANDINGAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANTARA FIKIH MAWARIS DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KABUPATEN WAJO (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B)”**

bernama lengkap Andi Wahyudi, Nim: 10100113072, Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak H. Andi Rizal dan Ibu Hj. Besse Tenri Jaja, S.Pd.I., yang lahir pada tanggal 11 Desember 1995 di Uraiyang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.

Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 311 Uraiyang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo pada tahun 2002-2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Al-Mukhlisin DDI Paria, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo di tahun 2007-2008. Namun pindah sekolah di MTs. As’adiyah Putra II Sengkang, Laponkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo pada tahun 2008-2010. Dengan tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah Nurul As’adiyah Callaccu Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo tahun 2010-2013. Kemudian ditahun yang sama yakni tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar di Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, pada Jurusan Peradilan hingga tahun 2017.